



DIKTAT

Mata Kuliah
**ISLAM DALAM POLITIK
INTERNASIONAL**

Pengajar
Ahmad Khoirul Umam, PhD

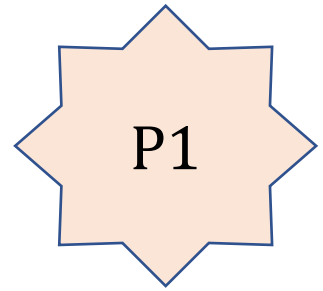
Semester Gasal 2019/2020

**Prodi Hubungan Internasional,
Fakultas Falsafah & Peradaban
Universitas Paramadina, Jakarta**

Daftar Isi

	Halaman
Kelas ke-1: Pengantar Islam dalam Politik Internasional.....	3
Kelas ke-2: Islam dalam Kajian Diplomasi dan Politik Internasional	10
Kelas ke-3: Islam, Agama & Politik Identitas	17
Kelas ke-4: Perkembangan Pemikiran Politik Islam	28
Kelas ke-5: Dinamika Konflik dan Perdamaian di Dunia Islam.....	35
Kelas ke-6: Good Governance dan Anti-Korupsi di Negara-negara Islam.....	44
Kelas ke-7:Terorisme dan Radikalisme Islam dalam Keamanan Internasional.....	48
Kelas ke-8: Ujian Tengah Semester.....	53
Kelas ke-9: Dinamika Politik Islam di Timur Tengah.....	54
Kelas ke-10: Dinamika Politik Islam di Asia Tenggara	59
Kelas ke-11: Dinamika Politik Islam di Asia Selatan dan Asia Tengah.....	65
Kelas ke-12: Dinamika Politik Islam di Eropa.....	76
Kelas ke-13: Dinamika Politik Islam di Australia.....	82
Kelas ke-14: Dinamika Politik Islam di Amerika Serikat.....	89
Kelas ke-15: Tantangan dan Masa Depan Politik Islam dalam Diplomasi & Politik Internasional	94
Kelas ke-16: Ujian Akhir Semester.....	107

PENGANTAR ISLAM DALAM POLITIK INTERNASIONAL



DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan, wawasan dan pemahaman serta kemampuan analisa bagi mahasiswa mengenai Islam dalam diskursus diplomasi global dan internasional politik. Mata kuliah ini juga akan melihat Islam sebagai pisau analisa untuk memahami konsep-konsep Barat, seperti Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi, globalisasi dan politik internasional. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas berbagai perspektif dari berbagai Kawasan dunia dimana Islam menjadi identitas serta instrumen politik dan kebijakan publik untuk mencapai agenda kepentingan untuk politik nasional maupun global. Mata kuliah juga ini akan membahas tentang dinamika interaksi antara Islam dan politik identitas dalam diplomasi dengan fokus khusus di Indonesia. Materi ini akan memperkaya pemahaman mahasiswa tentang perkembangan dunia Islam dalam *landscape* politik internasional.

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa diharapkan:

1. Agar mahasiswa memperoleh pemahaman mengenai Islam dalam diskursus diplomasi global dan internasional politik. Mahasiswa juga akan perkenalkan pada model analisa dimana Islam menjadi pisau analisa untuk memahami konsep-konsep Barat, seperti Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi, globalisasi dan politik internasional.

2. Agar mahasiswa memperoleh dan dapat mengembangkan kemampuan analitis dari berbagai kawasan dunia dimana Islam menjadi identitas serta instrumen politik dan kebijakan publik untuk mencapai agenda kepentingan untuk politik nasional maupun global.

SILABUS PEMBELAJARAN

KELAS KE-	MATERI	DOSEN	METODE
1	Pengantar Islam dalam Politik Internasional	AKU	Online (zoom meeting)
2	Islam dalam Kajian Diplomasi dan Politik Internasional	AKU	Online (zoom meeting)
3	Islam, Agama & Politik Identitas	AKU	Online (zoom meeting)
4	Perkembangan Pemikiran Politik Islam	AKU	Online (zoom meeting)
5	Dinamika Konflik dan Perdamaian di Dunia Islam	AKU	Online (zoom meeting)
6	Good Governance dan Anti-Korupsi di Negara-negara Islam	AKU	Online (zoom meeting)
7	Terorisme dan Radikalisme Islam dalam Keamanan Internasional	AKU	Online (zoom meeting)
8.	Ujian Tengah Semester (UTS)		
9	Dinamika Politik Islam di Timur Tengah	AKU	Online (zoom meeting)
10	Dinamika Politik Islam di Asia Tenggara	AKU	Online (zoom meeting)
11	Dinamika Politik Islam di Asia Selatan dan Asia Tengah	AKU	Online (zoom meeting)
12	Dinamika Politik Islam di Eropa	AKU	Online (zoom meeting)
13	Dinamika Politik Islam di Australia	AKU	Online (zoom meeting)
14	Dinamika Politik Islam di Amerika Serikat	AKU	Online (zoom meeting)
15	Tantangan dan Masa Depan Politik Islam dalam Diplomasi & Politik Internasional	AKU	Online (zoom meeting)
16.	Ujian Akhir Semester UAS: Keterangan: DR. AHMAD KHOIRUL UMAM (AKU)		

KETENTUAN KEHADIRAN KELAS

Metode Pembelajaran Daring

- a) *Asynchronous* : diselenggarakan dengan menggunakan *platform eLearning* Paramadina; atau Whatsapp Group
- b) *Synchronous* : diselenggarakan dengan menggunakan *platform* Zoom

Tugas-tugas:

- a) Sebelum pertemuan kelas: Membaca bahan perkuliahan terkait materi yang akan disampaikan pada saat kelas sebelumnya
- b) Nilai perkuliahan: Tugas terstruktur pada pertemuan kelas yang telah ditetapkan atau satu makalah ilmiah

TATA CARA PENILAIAN

Bobot Penilaian:

1. Rata-rata nilai yang diberikan Dosen selama perkuliahan adalah:
 - Keaktifan mahasiswa dan hasil tugas-tugas perkuliahan (20%)
 - Nilai Ujian Tengah Semester atau UTS (40%)
 - Nilai Ujian Akhir Semester atau UAS (40%)
 - Nilai akhir merupakan kewenangan Dosen untuk menentukannya sesuai kontrak yang telah disepakati. Apabila Dosen menilai perlu melakukan penyesuaian pembobotan nilai akhir dengan pertimbangan menjunjung tinggi kepentingan mahasiswa maka Dosen berhak melakukannya.
 - Hal-hal yang disepakati dalam kontrak ini dapat ditinjau kembali antara dosen dan mahasiswa di kemudian hari. Perubahan isi kontrak perkuliahan akan dilaksanakan dengan pemberitahuan.

Kriteria Penilaian:

Nilai Interval

A	≥ 85
-A	80-84
B+	75-79
B	70-74
-B	65-69
C+	60-64
C	$\leq 55-59$
D	Indisipliner

Kontak

Ahmad Khoirul Umam, Ph.D

ahmad.khoirul@paramadina.ac.id

Akses materi kuliah dan panduan perkuliahan:

<http://elearning.paramadina.ac.id>

Peraturan selama Penyelenggaraan Praktikum Daring

Asynchronous

- Dosen berhak menentukan absensi sebagai penanda kehadiran berdasarkan pengisian langsung di *MyParmad* ataupun melalui bukti pengumpulan tugas.
- Pada pengisian langsung, Dosen akan melakukan pengisian BAP Perkuliahan *Online* di *MyParmad* sesuai dengan jadwal perkuliahan yang telah disepakati
- Jadwal perkuliahan pengganti yang telah disepakati Dosen dan Mahasiswa akan disesuaikan ketika Dosen menginformasikan kepada mahasiswa dan Bagian Akademik Universitas
- Pada pengisian kehadiran berdasarkan bukti pengumpulan tugas, Dosen akan melakukan koordinasi dengan Tim Akademik Program Studi untuk pengisian BAP maupun absensi mahasiswa.

Synchronous

- Dalam penyelenggaraan perkuliahan dengan metode *synchronous*, pengisian BAP perkuliahan *Online* di *MyParmad* baru akan dilakukan Dosen ketika perkuliahan selesai.
- Selama perkuliahan berlangsung, absensi dengan Google Form akan disebarkan dan mahasiswa wajib mengisi dengan melampirkan bukti foto mengikuti perkuliahan *online*.
- Selama perkuliahan berlangsung, setiap mahasiswa harus melakukan *mute audio* dan Dosen akan meminta untuk mengaktifkan audio apabila diperlukan.
- Selama perkuliahan berlangsung, sewaktu-waktu Dosen dapat meminta untuk mengaktifkan fitur video dan mahasiswa harus siap.

TUGAS PERKULIAHAN 1

Capaian Belajar :

Setelah menyelesaikan kelas pertama ini mahasiswa dapat memahami konteks mata kuliah Islam dalam Politik Internasional, dalam konteks kajian studi Hubungan Internasional.

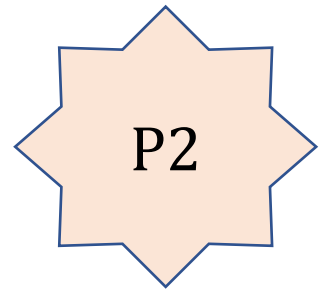
Cakupan Pemahaman

- Penjelasan SAP
- Penjelasan metode perkuliahan
- Perumusan aturan perkuliahan
- Penjelasan komponen penilaian, tugas, dan lainnya.
- Pengenalan teori dan konsep tentang Islam dan politik.
- Sejarah pemikiran politik Islam
- Konteks Islam dalam politik internasional

TUGAS UNTUK PERKUALIAHAN SELANJUTNYA

- Mahasiswa secara berkelompok melakukan telaah literatur tentang peran politik Islam dan hubungannya dengan teori hubungan internasional
- Setelah menemukan artikel-artikel mengenai hal tersebut, diskusikan dan susun *summary* tentang peran Islam dalam geo-ekonomi politik global kontemporer.
- *Summary* disajikan dalam bentuk *power point* dan dikumpulkan kepada Dosen

ISLAM DALAM POLITIK INTERNASIONAL: TEORI & PENDEKATAN STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL



CAPAIAN BELAJAR

Mahasiswa memahami dan bisa menjelaskan secara umum mengenai teori dan konsep tentang Islam sebagai identitas dalam politik internasional.

AGAMA DALAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

Dalam konteks hubungan internasional, agama sering kali dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi dinamika politik internasional. Islam, sebagai agama terbesar kedua di dunia, tidak terkecuali dalam hal ini. Sebagai agama yang memiliki pengikut di seluruh dunia, Islam memiliki dampak yang signifikan dalam diplomasi dan politik internasional. Dalam artikel ini, akan dibahas pengaruh Islam dalam diplomasi dan politik internasional, dilihat dari teori dan pendekatan studi hubungan internasional.

Ada beberapa teori dan pendekatan dalam studi hubungan internasional yang dapat membantu dalam memahami pengaruh Islam dalam diplomasi dan politik internasional. Pertama, teori realisme memandang bahwa negara berperilaku rasional dan egois dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Dalam konteks ini, agama dipandang sebagai faktor yang dapat digunakan oleh negara dalam mencapai kepentingannya.

Oleh karena itu, agama, termasuk Islam, dapat digunakan sebagai instrumen dalam diplomasi dan politik internasional.

Kedua, pendekatan konstruktivisme menekankan bahwa identitas sosial, termasuk agama, dapat mempengaruhi perilaku negara dalam hubungan internasional. Agama dapat membentuk identitas nasional dan mengarahkan tindakan negara dalam hubungan internasional. Dalam konteks ini, Islam dapat mempengaruhi cara negara dalam berinteraksi dengan negara lain.

Ketiga, pendekatan kritis menekankan bahwa politik internasional dipengaruhi oleh struktur kekuasaan global yang tidak merata. Dalam konteks ini, Islam sebagai agama mayoritas di dunia dapat digunakan sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara Muslim dan negara-negara berkembang dalam hubungan internasional.

Pengaruh Islam dalam diplomasi dan politik internasional dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti pengaruh Islam dalam organisasi internasional, hubungan bilateral antarnegara, dan konflik antarnegara.

Pertama, peran Islam dalam konflik dan keamanan global. Sejak tragedi 11 September 2001, terdapat pemahaman yang salah kaprah bahwa Islam identik dengan terorisme. Pemahaman ini menyebabkan persepsi negatif terhadap Islam di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Sebagai negara mayoritas Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peran penting dalam memperbaiki persepsi negatif terhadap Islam melalui diplomasi dan politik internasional.

Kedua, pengaruh Islam dalam organisasi internasional dapat dilihat dari adanya organisasi internasional yang didirikan oleh negara-negara Muslim. Salah satu organisasi internasional yang didirikan oleh negara-negara Muslim adalah Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), yang didirikan pada tahun 1969. OKI memiliki 57 negara anggota dan menjadi salah satu

organisasi internasional terbesar di dunia. OKI memiliki peran penting dalam mempromosikan kerjasama ekonomi, sosial, dan budaya antara negara-negara Muslim. Selain itu, OKI juga memiliki peran dalam isu-isu politik dan keamanan internasional. Pada tahun 2019, OKI mengeluarkan pernyataan mengenai situasi di Palestina, yang mengecam tindakan Israel yang merampas tanah Palestina dan menyerukan untuk mendukung Palestina.

Ketiga, isu kemanusiaan dan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, peran Islam dapat dilihat melalui bagaimana konsep-konsep seperti amanah, adil, dan rahmat dapat diimplementasikan dalam hubungan internasional untuk mempromosikan hak asasi manusia dan kemanusiaan.

Keempat, Islam dalam perkembangan ekonomi global. Sebagai agama yang memiliki aturan-aturan khusus dalam bidang ekonomi, Islam memiliki potensi besar dalam mengembangkan ekonomi global. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai produk keuangan syariah yang semakin populer di berbagai negara. Menurut pendekatan kritis yang mencoba untuk melihat secara kritis struktur sosial, ekonomi, dan politik yang ada dan bagaimana Islam dapat mempengaruhi struktur tersebut, maka pengaruh ekonomi syariah dianggap sebagai hal penting dan potensial untuk ditelaah lebih lanjut. Hal itu lebih produktif daripada melihat Islam dalam konteks diplomasi dan politik internasional yang seringkali dikaitkan dengan pandangan negatif terhadap agama Islam yang muncul pasca serangan teroris 11 September 2001.

Beberapa penelitian terkait pengaruh Islam dalam diplomasi dan politik internasional di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah (2019) yang membahas tentang pengaruh politik Islam dalam kerjasama ASEAN-China, dan penelitian yang dilakukan oleh Aziz (2017)

yang membahas tentang konsep “Umah Islamiyah” dan pengaruhnya dalam hubungan internasional.

Selain itu, beberapa data juga menunjukkan pentingnya peran Islam dalam diplomasi dan politik internasional. Pada tahun 2020, Sekjen PBB António Guterres menyatakan bahwa agama-agama, termasuk Islam, dapat berperan dalam mempromosikan perdamaian dan toleransi. Selain itu, dalam sebuah survei oleh Pew Research Center pada tahun 2015, sebanyak 39% dari responden di seluruh dunia menyatakan bahwa agama Islam memiliki pengaruh positif dalam masyarakat.

Namun, meskipun terdapat pengaruh positif, terdapat juga dampak negatif yang ditimbulkan oleh pengaruh Islam dalam diplomasi dan politik internasional. Beberapa dampak negatif tersebut antara lain penggunaan agama untuk kepentingan politik yang menyebabkan polarisasi dalam masyarakat, dan peningkatan diskriminasi terhadap Muslim di beberapa negara.

Sebagai kesimpulan, Islam memiliki pengaruh yang signifikan dalam diplomasi dan politik internasional. Pendekatan teori dan studi hubungan internasional dapat digunakan untuk memahami pengaruh Islam tersebut. Selain itu, terdapat juga penelitian dan data yang relevan yang dapat digunakan untuk memperdalam pemahaman terhadap pengaruh Islam dalam diplomasi dan politik internasional. Meskipun terdapat dampak positif, namun perlu diwaspadai terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh pengaruh Islam dalam diplomasi dan politik internasional.

Dalam konteks ini, studi hubungan internasional memandang bahwa agama dapat menjadi faktor penting dalam politik internasional, terutama dalam membentuk identitas nasional dan transnasional, kebijakan luar negeri, konflik, dan kerjasama internasional. Dalam hal ini, Islam sebagai

agama yang mewakili sekitar seperempat dari populasi dunia, memiliki peran penting dalam dinamika politik dan diplomasi internasional.

Sebuah studi yang dilakukan oleh Ali (2015) mengungkapkan bahwa Islam memainkan peran yang signifikan dalam hubungan internasional, baik sebagai pengaruh dalam kebijakan luar negeri suatu negara, maupun sebagai sumber konflik dalam skala global. Lebih lanjut, Ali menegaskan bahwa kekuatan Islam sebagai faktor politik internasional terletak pada kemampuannya dalam menghubungkan masalah lokal dengan masalah global, serta mampu menciptakan solidaritas di antara negara-negara Islam.

Dalam konteks hubungan internasional, Islam dapat dilihat melalui beberapa pendekatan teoritis, seperti Realisme, Konstruktivisme, Feminisme, dan Postkolonialisme. Pendekatan Realisme, yang menempatkan keamanan nasional sebagai prioritas utama dalam hubungan internasional, melihat Islam sebagai ancaman bagi stabilitas dunia, terutama setelah serangan 11 September di Amerika Serikat. Pendekatan Konstruktivisme, di sisi lain, menekankan pada peran identitas dalam membentuk kebijakan luar negeri suatu negara, sehingga Islam dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Pendekatan Feminisme memandang bahwa pandangan gender dalam Islam dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Sementara itu, pendekatan Postkolonialisme menyoroti peran kolonialisme dalam membentuk persepsi dan praktik politik dunia, termasuk dalam konteks hubungan internasional dan agama.

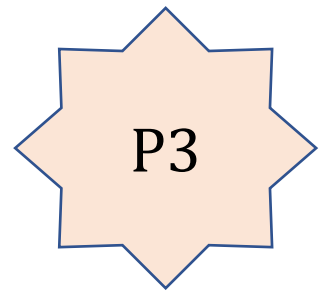
Seiring dengan peran penting Islam dalam diplomasi dan politik internasional, banyak negara yang mulai memperhatikan pengaruh Islam dalam kebijakan luar negeri mereka. Sebagai contoh, Arab Saudi dan Qatar memiliki kebijakan luar negeri yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, yang tercermin dalam dukungan mereka terhadap kelompok-kelompok

Islam di seluruh dunia. Selain itu, organisasi seperti Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan Dewan Kerjasama Teluk (GCC) juga memiliki peran penting dalam membentuk kebijakan luar negeri negara-negara anggota mereka. Untuk pemahaman lebih lanjut, silakan baca daftar referensi berikut ini:

1. Abdo, N. (2017). Islam in international relations. Oxford Research Encyclopedia of International Studies.
2. Akbarzadeh, S., & Conduit, D. (2015). Islam and foreign policy activism: ideas, interests and institutions. *Journal of Political Science and International Relations*, 8(1), 1-12.
3. Altunişik, M. B., & Turhan, E. (2016). A critical overview of Islamic contributions to international relations. *Journal of Balkan and Near Eastern Studies*, 18(2), 111-124.
4. Anwar, M. (2016). The Role of Islam in International Relations. *American Journal of Political Science and Government Research*, 1(1), 1-8.
5. Barakat, S., & Zartman, I. W. (2016). *Understanding Islamic political culture: theory, method and practice*. Routledge.
6. Esposito, J. L., & Voll, J. O. (1996). *Islam and democracy*. Oxford University Press.
7. Hashemi, N., & Postel, D. (2016). *Sectarianization: mapping the new politics of the Middle East*. Oxford University Press.
8. Kamali, M. H. (2006). *Islam and the theory of international relations*. International Institute of Islamic Thought.
9. Kayaoglu, T. (2013). *Sufis and Salafis in the politics of the Middle East*. University of Utah Press.

10. Khan, M. A. (2017). Muslim diplomacy: an analysis of Islamic contribution to the diplomacy of contemporary Muslim states. *The Muslim World*, 107(2), 314-331.
11. Oktav, O., & Sarphan, M. A. (2020). The role of Islam in Turkey's foreign policy: case of humanitarian diplomacy. *Journal of Islamic Studies and Culture*, 8(1), 1-14.
12. Özcan, M. (2016). Islamic approaches to international relations theory: a literature review. *Journal of Balkan and Near Eastern Studies*, 18(2), 153-171.
13. Shariati, A., & Yousefi, M. R. (2018). Islam and diplomacy: the role of religion in foreign policy. *Journal of Islam and International Relations*, 3(1), 51-70.
14. Tibi, B. (2012). *Islamism and Islam*. Yale University Press.
15. Yilmaz, H. (2019). *The role of Islam in Turkey's foreign policy: religion, identity, and diplomacy*. Springer.

ISLAM DALAM KAJIAN DIPLOMASI DAN POLITIK INTERNASIONAL



CAPAIAN PEMBELAJARAN

- Mahasiswa bisa memahami Islam dalam konteks diplomasi dan kajian politik internasional
- Mahasiswa bisa memahami intermestik faktor dalam kebijakan luar negeri negara-negara Islam atau negara berbasis umat Islam

SEJARAH ISLAM PASCA PERANG DUNIA I & PERANG DUNIA II

Islam selalu menjadi bagian penting dalam sejarah politik dan diplomasi internasional. Setelah perang dunia I dan II, hubungan antara Islam dengan negara-negara Barat mengalami perubahan signifikan. Pasca perang dunia I, banyak negara Islam yang menjadi mandat kolonial oleh negara-negara Barat. Sementara itu, pasca perang dunia II, banyak negara Islam yang merdeka dan berjuang untuk mempertahankan keberadaan agama mereka di tengah dunia yang semakin global dan sekuler.

Pasca Perang Dunia I, banyak negara Islam yang menjadi mandat kolonial oleh negara-negara Barat seperti Inggris dan Prancis. Dalam mandat kolonial ini, negara-negara Barat mencoba untuk memperkenalkan nilai-nilai Barat seperti demokrasi dan hak asasi manusia ke dalam masyarakat Islam. Namun, upaya ini seringkali mendapatkan tantangan dari

kelompok-kelompok Islam yang menganggap bahwa pengenalan nilai-nilai Barat ini dapat mengancam keberadaan Islam.

Di sisi lain, beberapa pemikir Barat juga memandang Islam sebagai agama yang tidak menghargai hak asasi manusia dan demokrasi. Pandangan seperti ini memicu perdebatan dan konflik antara negara-negara Barat dengan negara-negara Islam pasca perang dunia I.

Sejarah politik Islam di Perang Dunia I memberikan gambaran tentang bagaimana agama dan politik saling berhubungan dan berpengaruh satu sama lain pada masa itu. Perang Dunia I adalah perang besar pertama yang melibatkan banyak negara di seluruh dunia, termasuk negara-negara Muslim yang terletak di Timur Tengah dan Afrika Utara.

Pada awal abad ke-20, wilayah-wilayah Muslim berada di bawah kekuasaan kekaisaran Ottoman. Namun, kekaisaran ini melemah dan akhirnya hancur selama Perang Dunia I. Negara-negara Barat seperti Inggris dan Prancis memanfaatkan kesempatan ini untuk memperluas kekuasaannya di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara.

Pada saat yang sama, para pemimpin Muslim mulai merangkul gagasan nasionalisme dan kemerdekaan dari kekuasaan Barat. Salah satu tokoh yang memimpin gerakan ini adalah Sharif Hussein bin Ali, pemimpin Hashemite dari Mekkah. Pada tahun 1916, ia menandatangani Perjanjian Husain-McMahon dengan Inggris yang menjanjikan kemerdekaan wilayah Arab yang dikuasai Ottoman jika mereka memberontak melawan kekaisaran tersebut.

Namun, janji ini tidak ditepati oleh Inggris setelah Perang Dunia I berakhir. Inggris dan Prancis membagi-bagi wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara sesuai dengan kesepakatan Sykes-Picot pada tahun 1916. Pembagian ini tidak memperhatikan kesatuan etnis dan agama di wilayah tersebut dan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat Muslim.

Di sisi lain, gerakan pan-Islamisme juga mulai berkembang pada masa Perang Dunia I. Gerakan ini dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Rashid Rida dan Muhammad Abduh, yang mengusulkan kesatuan umat Muslim di seluruh dunia untuk melawan kekuasaan Barat. Pada tahun 1918, Konferensi Pan-Islam yang diadakan di Mekkah menyatakan dukungannya terhadap gerakan kemerdekaan nasional di wilayah Muslim yang dikuasai Barat.

Namun, gerakan pan-Islamisme juga menghadapi tantangan internal dari kalangan Muslim sendiri. Beberapa kelompok mengkritik gerakan ini sebagai radikal dan tidak mewakili semua umat Muslim. Selain itu, kekuatan-kekuatan Barat juga mencoba untuk memecah belah gerakan ini dengan memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok yang lebih moderat.

Dalam konteks politik internasional pasca Perang Dunia I, Islam memainkan peran penting dalam gerakan nasionalisme dan kemerdekaan di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara. Namun, agama ini juga menghadapi tantangan dan konflik internal serta campur tangan kekuatan-kekuatan Barat yang ingin mempertahankan pengaruhnya di wilayah tersebut.

Setelah jatuhnya Kesultanan Utsmaniyah, Inggris dan Prancis menguasai sebagian besar Timur Tengah, membaginya menjadi wilayah pengaruh melalui Perjanjian Sykes-Picot tahun 1916. Orang-orang Arab merasa dikhianati oleh Sekutu, yang berjanji untuk mendukung kemerdekaan mereka sebagai imbalan atas pemberontakan mereka melawan Ottoman. Sebagai tanggapan, banyak pemimpin Arab menyerukan kebangkitan Islam sebagai sarana untuk mempersatukan rakyat mereka dan melawan kontrol asing.

Salah satu pemimpin tersebut adalah Sharif Hussein bin Ali, yang menyatakan dirinya sebagai Raja tanah Arab dan melancarkan pemberontakan melawan Ottoman pada tahun 1916. Dia didukung oleh

Inggris, yang berharap menggunakan pemberontakannya untuk melemahkan Kekaisaran Ottoman. Sebagai bagian dari perjanjian tersebut, Hussein berjanji untuk mendirikan negara pan-Arab setelah perang. Namun, ketika perang berakhir, Inggris dan Prancis mengingkari janji mereka dan membagi tanah Arab menjadi mandat di bawah kendali mereka.

Kegagalan pemberontakan Arab dan pembagian berikutnya di Timur Tengah berkontribusi pada meningkatnya rasa kekecewaan di kalangan umat Islam. Banyak yang mulai mempertanyakan keefektifan demokrasi ala Barat dan gagasan sekularisme. Ini memunculkan generasi baru pemikir Islam yang berusaha menghidupkan kembali iman Islam dan membuatnya relevan dengan zaman modern.

Salah satu pemikir yang paling terkemuka adalah Hassan al-Banna, yang mendirikan Ikhwanul Muslimin di Mesir pada tahun 1928. Ikhwanul Muslimin menyerukan untuk kembali ke keyakinan Islam yang sejati dan mendirikan negara Islam. Mereka juga menekankan pentingnya keadilan sosial dan amal sebagai aspek fundamental Islam.

Di Iran, Ayatollah Ruhollah Khomeini muncul sebagai tokoh terkemuka dalam kebangkitan Islam. Dia menentang kebijakan Westernisasi Shah dan menyerukan pembentukan negara Islam berdasarkan prinsip-prinsip hukum syariah. Pada tahun 1979, Revolusi Islam menggulingkan Shah dan mendirikan Republik Islam Iran.

Kebangkitan Islam politik setelah Perang Dunia I memiliki dampak besar pada politik Timur Tengah dan sekitarnya. Gerakan Islamis telah terlibat dalam perjuangan politik di negara-negara seperti Mesir, Aljazair, Turki, dan Indonesia.

Setelah Perang Dunia II, negara-negara Eropa mengalami kemerosotan ekonomi dan politik. Hal ini membuat AS mengambil peran penting sebagai kekuatan global yang mengambil tanggung jawab dalam

menyelesaikan masalah di dunia internasional. Namun, hegemoni AS sebagai kekuatan global tidak bertahan lama karena kemunculan Uni Soviet sebagai kekuatan baru yang juga memiliki pengaruh global.

Pada masa ini, banyak negara Islam yang merdeka dan berjuang untuk mempertahankan keberadaan agama mereka di tengah dunia yang semakin global dan sekuler. Negara-negara Islam yang baru merdeka ini juga memainkan peran penting dalam diplomasi dan politik internasional.

Pasca Perang Dunia II, Islam menjadi salah satu isu penting dalam diplomasi dan politik internasional. Pasca perang dunia II, terjadi beberapa peristiwa penting yang berhubungan dengan Islam, seperti berdirinya negara Israel pada tahun 1948 dan konflik Arab-Israel yang berkepanjangan, krisis minyak pada tahun 1973, dan Revolusi Iran pada tahun 1979. Semua peristiwa tersebut memiliki dampak yang signifikan pada hubungan internasional dan membawa isu Islam ke dalam sorotan dunia internasional.

Pada akhir tahun 1970-an, AS mulai mengambil langkah untuk meningkatkan hubungan dengan negara-negara Muslim. Hal ini terlihat pada kunjungan Presiden AS Jimmy Carter ke Pakistan pada tahun 1978 dan Presiden AS Ronald Reagan ke Mesir pada tahun 1982. Selain itu, AS juga memulai program untuk membantu negara-negara Muslim dalam pembangunan dan pengembangan ekonomi.

Selain AS, Uni Soviet juga memiliki peran penting dalam hubungan internasional pasca perang dunia II. Uni Soviet memiliki hubungan dekat dengan negara-negara Muslim seperti Suriah, Mesir, dan Libya. Selain itu, Uni Soviet juga mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina melawan Israel.

Namun, hubungan antara negara-negara Muslim dan Barat juga tidak selalu harmonis. Terdapat beberapa peristiwa yang menciptakan ketegangan antara negara-negara Muslim dan Barat, seperti pengeboman

kedutaan AS di Kenya dan Tanzania pada tahun 1998 dan serangan teroris di New York pada tahun 2001 yang dilakukan oleh kelompok Al-Qaida.

Teori dan pendekatan studi hubungan internasional yang dapat digunakan untuk memahami peran Islam dalam diplomasi dan politik internasional pasca perang dunia I dan perang dunia II adalah teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme menekankan pentingnya konstruksi sosial dan makna yang dibentuk oleh aktor-aktor dalam hubungan internasional. Teori ini juga menekankan peran identitas dalam hubungan internasional.

Dalam konteks ini, identitas Islam dapat memainkan peran penting dalam membentuk hubungan antara negara-negara Islam dengan negara-negara Barat. Identitas ini juga dapat mempengaruhi bagaimana negara-negara Islam menanggapi isu-isu seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan beragama.

Sebagai contoh, negara Iran yang dipimpin oleh Imam Khomeini pada tahun 1979 mengusung revolusi Islam yang menentang nilai-nilai Barat dan menganggap Islam sebagai sumber kebenaran tertinggi. Revolusi ini memicu ketegangan antara Iran dengan negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan Inggris.

AGAMA & IDENTITAS & KONFLIK ANTAR PERADABAN

Pemikiran kontroversial Samuel Huntington tentang "Benturan Antar Peradaban" telah menjadi topik yang sangat menarik dan kontroversial dalam kajian hubungan internasional. Pemikirannya yang kontroversial tentang konflik antar peradaban telah menjadi topik yang sering dibahas dan diperdebatkan di dunia internasional sejak publikasi artikelnya pada tahun 1993, dan kemudian bukunya yang berjudul "*The Clash of Civilizations*

and the Remaking of World Order" pada tahun 1996. Artikel ini akan membahas pemikiran kontroversial Huntington dan kritik terhadapnya.

Pemikiran Huntington terfokus pada pandangan bahwa konflik antara peradaban, bukan ideologi, menjadi pemicu utama konflik di abad ke-21. Huntington mengidentifikasi peradaban sebagai "kelompok identitas yang paling luas" yang membentuk "pola dasar perbedaan budaya" di dunia. Huntington kemudian mengklaim bahwa konflik antara peradaban adalah bentuk konflik yang paling serius dan signifikan di dunia saat ini.

Huntington membagi dunia menjadi delapan peradaban yang berbeda: Barat, Latin, Ortodoks, Islam, Hindu, Sinik, Afrika, dan Amerika. Menurutnya, setiap peradaban memiliki nilai-nilai, norma, dan kepercayaan yang berbeda. Konflik muncul ketika nilai-nilai dan kepercayaan tersebut bersentuhan atau bersaing dengan nilai-nilai dan kepercayaan peradaban lain. Dalam pandangan Huntington, konflik antara peradaban adalah konflik yang tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikurangi dampaknya melalui pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan-perbedaan budaya.

Huntington menegaskan bahwa benturan peradaban adalah salah satu kekuatan utama yang memandu dinamika dunia pascaperang Dingin, yang menggantikan konflik ideologis yang menggerakkan dunia selama beberapa dekade sebelumnya. Huntington mengklaim bahwa "peradaban adalah kelompok-kelompok tertentu dari manusia yang terorganisir ke dalam budaya yang berbeda-beda" (Huntington, 1993: 24). Ia memandang bahwa konflik antara peradaban sebagai sebuah benturan yang tidak dapat dihindari, sebagaimana terlihat dari sejarah manusia.

Dalam pemikirannya, Huntington membagi dunia menjadi delapan peradaban yang berbeda, yaitu Barat, Ortodoks, Islam, Afrika, Hindu, Sinik, Jepang, dan Amerika Latin. Ia memandang bahwa peradaban-peradaban ini memiliki karakteristik unik dan berbeda yang menentukan pandangan

dunia, nilai, dan sikap terhadap politik internasional. Dalam hal ini, Huntington menegaskan bahwa perbedaan-perbedaan ini cenderung menyebabkan ketegangan dan konflik antar peradaban.

Namun, pemikiran Huntington ini menjadi kontroversial karena dipandang sebagai simplifikasi yang terlalu mempersempit dan memperumit perbedaan-perbedaan antar peradaban. Selain itu, pengelompokan peradaban menjadi delapan bagian juga dipertanyakan, sebab banyak keanekaragaman dan keragaman di dalam setiap peradaban itu sendiri.

Beberapa pakar dan kritikus berpendapat bahwa argumen Huntington mengabaikan perbedaan di dalam peradaban itu sendiri dan memandang bahwa semua orang dari satu peradaban berbagi pandangan yang sama. Selain itu, pemikiran Huntington cenderung mempertahankan suatu pandangan "klasik" tentang peradaban yang menegaskan adanya kelompok-kelompok yang tetap, homogen, dan terisolasi satu sama lain dalam peradaban masing-masing, yang bertentangan dengan kompleksitas dunia yang lebih heterogen.

Namun, pemikiran kontroversial Huntington telah menimbulkan kritik dari berbagai pihak. Kritik paling umum adalah bahwa pemikiran Huntington bersifat essentialistis dan stereotipikal, yaitu menganggap bahwa setiap peradaban memiliki ciri khas yang sama dan kaku, serta menganggap bahwa peradaban-peradaban tersebut selalu bersaing dan konflik satu sama lain.

Banyak peneliti yang menentang pemikiran Huntington dan menganggap bahwa perbedaan-perbedaan budaya bukanlah sumber konflik, tetapi alih-alih, konflik dapat dipicu oleh ketidaksetaraan ekonomi dan politik, ketidakadilan, dan masalah-masalah lainnya yang tidak berkaitan dengan perbedaan budaya. Selain itu, kritik juga diarahkan pada

kurangnya pengakuan Huntington terhadap keberagaman dan dinamisme di dalam peradaban-peradaban itu sendiri, serta kurangnya pengakuan terhadap interaksi dan saling pengaruh antara peradaban.

Secara keseluruhan, meskipun pemikiran kontroversial Samuel Huntington tentang "Benturan Antar Peradaban" telah menimbulkan banyak debat dan kritik, pandangan ini tetap menjadi topik yang menarik untuk diperdebatkan dalam kajian hubungan internasional. Untuk lebih jelasnya, bisa dibaca melalui daftar bacaan berikut ini:

1. Ahmad, F. (2014). *Kajian Pemikiran Politik Kaum Muslimin di Indonesia (1900-1942)*. UIN Sunan Kalijaga Press.
2. As'ad, M. (1995). *Perkembangan Pemikiran Politik Islam di Indonesia*. LP3ES.
3. Azra, A. (1996). *Islam in the Indonesian World: An Account of Institutional Formation*. Mizan Pustaka.
4. Azra, A. (2004). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Mizan Pustaka.
5. Feith, H. (2007). *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Equinox Publishing.
6. Hatta, M. (1973). *Antara Demokrasi dan Tafsir Kebangsaan: Pembelaan Bung Hatta Terhadap Prinsip Demokrasi (edisi kedua)*. LP3ES.
7. Hefner, R. W. (2000). *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton University Press.
8. Ichwan, M. N. (2018). *Islam dan Kuasa: Politik dan Hierarchy di Indonesia*. Kepustakaan Populer Gramedia.
9. Kuntowijoyo. (2004). *Agama dan Masyarakat Sipil di Indonesia: Analisis Politik Islam*. LKiS Pelangi Aksara.

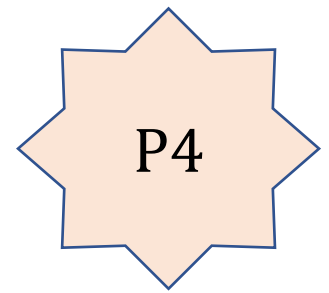
10. Ricklefs, M. C. (1991). *A History of Modern Indonesia Since c.1200* (edisi kedua). Macmillan Education.
11. Abdullah, Taufik. "Benturan Peradaban Menurut Samuel P. Huntington: Refleksi atas Peristiwa 11 September 2001." *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 21, no. 2 (2005): 123–36.
12. Alam, M. Shahid. "Samuel Huntington's *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*." *Journal of Political Studies* 21, no. 1 (2014): 275–90.
13. Bajrektarevic, Anis. "When (Economic) Diplomacy Fails." *GHIR Journal of Social Science and Interdisciplinary Research* 2, no. 4 (2015): 1–8.
14. Brown, Chris. "The Misunderstood Clash of Civilizations Debate." *Foreign Policy*, no. 133 (2003): 68–75.
15. Chomsky, Noam. "The Clash of Civilizations?" In *The Nation*, 1993.
16. Harrison, Lawrence E., and Samuel P. Huntington. *Culture Matters: How Values Shape Human Progress*. Basic Books, 2000.
17. Huntington, Samuel P. *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. Simon & Schuster, 1996.
18. Huntington, Samuel P. "If Not Civilizations, What? Paradigms of the Post-Cold War World." *The National Interest*, no. 20 (1990): 3–13.
19. Ishak, Muhammad Arif. "Benturan Peradaban dan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Pasca-11 September 2001." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 10, no. 3 (2006): 277–90.
20. Karlekar, Hiranmay. "A Critique of Samuel Huntington's 'Clash of Civilizations.'" *South Asian Journal*, no. 2 (1999): 67–81.

21. Kerr, Michael. "Huntington's Clashes: The Role of Civilizational Dialogues." *Alternatives: Global, Local, Political* 25, no. 1 (2000): 31–49.
22. Lapid, Yosef. "The Third Debate: On the Prospects of International Theory in a Post-Positivist Era." *International Studies Quarterly* 33, no. 3 (1989): 235–54.
23. Nashr, Seyed Ali, and Seyed Ali Shahbazin. "The Clash of Civilizations Reconsidered: A Neo-Gramscian Critique." *Journal of Sociology and Social Anthropology* 2, no. 1 (2011): 55–68.
24. Tessler, Mark. "Islamic Political Movements and Democratization: The Muslim Brotherhood in Comparative Perspective." *Comparative Politics* 34, no. 3 (2002): 337–54.
25. Tibi, Bassam. "The Clash of Civilizations: An Appraisal." In *The Challenge of Fundamentalism: Political Islam and the New World Disorder*, edited by Tibi, 60–87. University of California Press, 1998.

TUGAS PERKULIAHAN SELANJUTNYA

1. Masing-masing mahasiswa melakukan review atas materi artikel yang telah di-*share*
2. Kumpulkan laporan dalam bentuk docs dan presentasi singkat dalam bentuk ppt ke ahmad.khoirul@paramadina.ac.id
3. Dalam pertemuan kelas selanjutnya, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil *review* artikel secara singkat dengan waktu per kelompok adalah 10 menit (presentasi dan Q&A).
4. Setiap kelompok dapat memperkaya paper atau bahan presentasinya dengan sumber-sumber lain yang relevan.

PERKEMBANGAN PEMIKIRAN POLITIK ISLAM



CAPAIAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa memahami sejarah perkembangan pemikiran politik Islam, yang membentuk dinamika dan pergerakan sosial-politik di negara-negara Islam

DINAMIKA PEMIKIRAN POLITIK ISLAM

Sejak munculnya agama Islam pada abad ke-7, ajaran agama ini selalu memainkan peran penting dalam politik dan kekuasaan. Hal ini dapat dilihat dari sejarah awal Islam ketika Nabi Muhammad SAW memimpin bangsa Arab dari sebuah masyarakat yang tercerai berai menuju sebuah negara yang bersatu dan kuat. Sejak saat itu, ajaran politik Islam menjadi penting bagi umat Muslim untuk mengembangkan dan mengelola negara mereka. Di era modern, cendekiawan Muslim di seluruh dunia terus mengembangkan pemikiran politik Islam untuk menyesuaikan dengan tuntutan zaman.

Perkembangan pemikiran politik Islam dimulai pada abad ke-8 Masehi dengan munculnya sebuah gerakan yang disebut Khawarij. Gerakan ini berasal dari kelompok yang menentang kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib dan menolak otoritasnya. Khawarij memperjuangkan penerapan hukum Islam secara radikal dan menolak kompromi politik. Gerakan ini terus berkembang dan mempengaruhi pemikiran politik Islam di masa depan.

Pada abad ke-9, pemikiran politik Islam mengalami perkembangan yang signifikan dengan munculnya Imam Al-Mawardi. Beliau adalah seorang

cendekiawan Muslim yang menulis buku "Al-Ahkam As-Sultaniyyah" yang membahas tentang prinsip-prinsip politik Islam. Buku ini memberikan landasan hukum dan prinsip dasar bagi pemerintahan Islam. Al-Mawardi juga memperkenalkan konsep Khilafah dan memberikan pedoman tentang bagaimana seorang khalifah harus memerintah.

Selama berabad-abad berikutnya, banyak cendekiawan Muslim yang terus mengembangkan pemikiran politik Islam. Salah satu tokoh terkenal adalah Ibn Taymiyyah yang hidup pada abad ke-13 Masehi. Beliau memperjuangkan kembali penerapan hukum Islam secara radikal dan menolak pengaruh budaya dan tradisi yang merusak. Ibn Taymiyyah juga menekankan pentingnya penegakan keadilan sosial dan mendukung jihad sebagai bagian dari politik Islam.

Pada abad ke-20, pemikiran politik Islam mengalami perkembangan yang signifikan dengan munculnya kelompok Ikhwanul Muslimin di Mesir pada tahun 1928. Kelompok ini dipimpin oleh Hassan Al-Banna dan memperjuangkan penerapan hukum Islam secara radikal. Kelompok ini menjadi populer di seluruh dunia Islam dan mempengaruhi perkembangan politik Islam di masa depan.

Beberapa tokoh intelektual Muslim yang memimpin gerakan politik Islam pada abad ke-20 meliputi Hasan al-Banna dari Ikhwan al-Muslimin, Syed Abul A'la Maududi dari Jamaat-e-Islami, Ali Shariati dari Iran, dan Sayyid Qutb dari Mesir. Karya-karya mereka dan pemikiran mereka memainkan peran penting dalam perkembangan pemikiran politik Islam di dunia modern.

Hasan al-Banna mendirikan Ikhwan al-Muslimin di Mesir pada tahun 1928 sebagai gerakan sosial dan politik Islam. Al-Banna menekankan pentingnya reformasi moral dan sosial dalam masyarakat Muslim dan menolak sekularisme sebagai bentuk pemerintahan yang tidak sesuai

dengan prinsip-prinsip Islam. Ikhwan al-Muslimin kemudian berkembang menjadi organisasi politik dan berusaha mengambil alih kekuasaan di Mesir.

Syed Abul A'la Maududi mendirikan Jamaat-e-Islami di India pada tahun 1941. Maududi menekankan pentingnya penerapan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat dan negara, serta menolak demokrasi sekuler yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Jamaat-e-Islami kemudian menjadi salah satu partai politik terbesar di Pakistan.

Ali Shariati adalah seorang intelektual Muslim dari Iran yang memainkan peran penting dalam gerakan revolusi Islam di Iran. Pemikiran Shariati menekankan pentingnya keadilan sosial dan politik dalam Islam serta peran masyarakat dalam perjuangan politik. Shariati mengembangkan konsep "Islam yang Berasaskan Manusia" yang menekankan pentingnya kebebasan dan martabat manusia dalam Islam.

Sayyid Qutb adalah seorang intelektual Muslim Mesir yang memainkan peran penting dalam perkembangan pemikiran politik Islam modern. Qutb mengecam kekuasaan sekuler yang dianggap mengabaikan prinsip-prinsip Islam dan menekankan pentingnya memperjuangkan penerapan hukum Islam dalam masyarakat dan negara. Pemikiran Qutb kemudian menjadi inspirasi bagi gerakan Islamisme di dunia Arab.

Perkembangan pemikiran politik Islam pada abad ke-20 ini tidak terlepas dari konteks sejarah yang mempengaruhi perkembangan Islam secara global, seperti kolonialisme, nasionalisme, dan globalisasi. Sebagai contoh, di Indonesia, pemikiran politik Islam berkembang pesat pada periode pasca-kolonial, ketika masyarakat mencari alternatif untuk membangun negara yang baru merdeka. Gerakan politik Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama didirikan sebagai respons terhadap kondisi politik, sosial, dan ekonomi yang ada.

Dalam konteks global, pemikiran politik Islam juga terus berkembang dan menunjukkan keberagaman. Ada gerakan Islamisme yang cenderung radikal dan menggunakan kekerasan sebagai sarana politik, tetapi ada juga gerakan Islam yang moderat dan mencari cara-cara damai untuk memperjuangkan aspirasi politik dan sosial mereka.

Selain itu, perdebatan antara kelompok modernis dan tradisional tentang bagaimana Islam dapat menyesuaikan diri dengan zaman terus berlangsung hingga saat ini. Modernis seperti Muhammad Abduh dan Rashid Rida, yang hidup pada awal abad ke-20, berpendapat bahwa Islam harus dipahami ulang untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Mereka mengusulkan sebuah interpretasi baru dari Islam yang menghilangkan tradisi yang mereka pandang ketinggalan zaman, seperti penggunaan istilah-istilah Arab kuno dan praktik keagamaan yang telah ketinggalan zaman.

Di sisi lain, kelompok tradisional, seperti kelompok Salafi dan Wahabi, berusaha untuk mempertahankan ajaran Islam sebagaimana yang telah diwariskan oleh para pendahulunya. Kelompok ini menolak pandangan modernis yang mereka anggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap ajaran Islam yang sebenarnya.

Perkembangan pemikiran politik Islam juga terjadi di kalangan cendekiawan Muslim dunia. Sayyid Qutb, seorang cendekiawan Muslim asal Mesir, adalah salah satu tokoh yang memainkan peran penting dalam perkembangan pemikiran politik Islam. Ia berpendapat bahwa negara Islam harus didirikan berdasarkan hukum syariah yang diterapkan dalam semua aspek kehidupan.

Pemikiran Qutb banyak memengaruhi kelompok-kelompok Islamis radikal seperti Al-Qaeda dan ISIS, yang menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan politik mereka. Namun, pemikiran Qutb juga memengaruhi

kelompok-kelompok Islamis moderat yang mengusulkan bentuk pemerintahan yang demokratis dan berdasarkan syariah.

Perkembangan pemikiran politik Islam terus berlanjut hingga saat ini. Beberapa kelompok Islamis moderat, seperti Partai Keadilan dan Pembangunan di Turki, berhasil memenangkan kekuasaan secara demokratis melalui pemilihan. Namun, masih banyak kelompok Islamis radikal yang menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan politik mereka.

Dalam konteks politik internasional, pemikiran politik Islam telah memengaruhi kebijakan luar negeri banyak negara Muslim. Beberapa negara Muslim mengusulkan ideologi Islam sebagai alternatif bagi ideologi Barat yang mereka pandang sebagai bentuk imperialisme budaya. Negara-negara seperti Iran dan Pakistan bahkan menunjukkan dukungan bagi kelompok-kelompok Islamis radikal di luar negeri.

Namun, tidak semua negara Muslim mendukung pemikiran politik Islam. Beberapa negara Muslim, seperti Turki dan Indonesia, mengusulkan model Islam yang moderat dan inklusif, yang menghargai keragaman dan toleransi.

Pada masa-masa inilah muncul sejumlah gerakan Islam yang radikal, seperti Al-Qaeda dan Taliban, yang berangkat dari pandangan bahwa Barat sebagai penjajah modern dan musuh Islam yang harus dilawan. Meskipun gerakan-gerakan ini menimbulkan banyak kontroversi, namun tidak dapat dipungkiri bahwa mereka telah membawa pengaruh besar dalam perkembangan pemikiran politik Islam saat ini.

Selain gerakan-gerakan radikal tersebut, terdapat juga gerakan-gerakan Islam moderat yang terus berkembang hingga saat ini, seperti Gerakan Fethullah Gülen di Turki, Persatuan Islam Malaysia, dan Muhammadiyah di Indonesia. Gerakan-gerakan ini mengusung pandangan

bahwa Islam dapat berdampingan dengan demokrasi dan modernitas tanpa harus kehilangan akar dan identitas Islam itu sendiri.

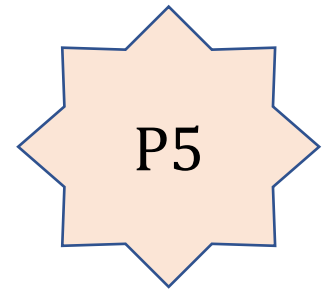
Kesimpulannya, pemikiran politik Islam telah mengalami perkembangan yang signifikan selama berabad-abad. Perkembangan pemikiran politik Islam yang telah berlangsung selama berabad-abad ini terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Pada awalnya, pemikiran politik Islam cenderung berfokus pada upaya mengembalikan kejayaan Islam dan mengusir kekuasaan asing dari negeri-negeri Islam. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, pemikiran politik Islam semakin meluas dan mencakup berbagai isu, seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan globalisasi.

Kendati demikian, perdebatan dan kontroversi masih terus muncul terkait bagaimana seharusnya Islam diterapkan dalam politik dan pemerintahan. Ada pihak yang mengusung pandangan radikal, yang cenderung menolak nilai-nilai demokrasi dan modernitas, sementara ada juga pihak yang mengusung pandangan moderat, yang berupaya menyesuaikan nilai-nilai Islam dengan tuntutan zaman tanpa harus mengorbankan identitas Islam itu sendiri.

Perkembangan pemikiran politik Islam ini juga tidak lepas dari pengaruh sejarah dan konteks sosial-politik pada saat itu. Sejarah Islam yang panjang dan beragam, serta perubahan sosial-politik yang terjadi di dunia Islam, turut membentuk dan memengaruhi pemikiran politik Islam yang berkembang pada masa-masa tertentu. Oleh karena itu, untuk memahami perkembangan pemikiran politik Islam secara utuh, tidak hanya dibutuhkan pemahaman terhadap teks-teks keagamaan dan filsafat politik, tetapi juga pemahaman terhadap sejarah dan konteks sosial-politik pada saat itu. Selanjutnya, silakan bacaan referensi berikut ini:

1. Ahmad, Mumtaz. (2012). *Islamic Political Thought: An Introduction*. Edinburgh University Press.
2. Aslan, Reza. (2017). *God: A Human History*. Random House.
3. Esposito, John L. (2018). *Islam: The Straight Path*. Oxford Univ. Press.
4. Hourani, Albert. (1991). *A History of the Arab Peoples*. Harvard University Press.
5. Kuru, Ahmet T. (2019). *Islam, Authoritarianism, and Underdevelopment: A Global and Historical Comparison*. Cambridge University Press
6. Ahmed, A. (2015). The Muslim Brotherhood and the Arab Spring. *Middle East Journal of Culture and Communication*, 8(2-3), 232-251.
7. Euben, R. L. (2006). *Journeys to the other shore: Muslim and Western travel accounts of the Other*. Princeton University Press.
8. Fischer, M. J. (2003). *Debating Muslims: Cultural dialogues in postmodernity and tradition*. University of Wisconsin Press.
9. Hallaq, W. B. (2005). *The origins and evolution of Islamic law*. Cambridge University Press.
10. Hodgson, M. G. S. (1974). *The venture of Islam: Conscience and history in a world civilization*. University of Chicago Press.
11. Keddie, N. R. (1986). *An Islamic response to imperialism*. University of California Press.
12. Rahman, F. (1999). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. University of Chicago Press.
13. Voll, J. O. (1982). *The Sudanese Islamic movement: Ideology and social structure*. Princeton University Press.

DINAMIKA KONFLIK DAN PERDAMAIAN DI DUNIA ISLAM



CAPAIAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa memahami dan bisa menjelaskan tentang dinamika konflik dan perdamaian di dunia Islam, sehingga memahami akar persoalan konflik dan juga alternatif langkah mitigasi konflik yang berkembang.

KONFLIK & PERDAMAIAN DI DUNIA ISLAM

Konflik di dunia Islam merupakan isu yang kompleks. Ada banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik, mulai dari sejarah, politik, sosial, ekonomi, agama, dan budaya. Islam sebagai agama yang mayoritas dipraktikkan di banyak negara di dunia, seringkali menjadi sumber konflik dan kekerasan. Namun, penting untuk memahami sejarah konflik di dunia Islam agar dapat menemukan solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan yang ada.

Sejarah konflik di dunia Islam dapat ditelusuri dari masa awal kemunculan Islam sebagai agama baru pada abad ke-7. Pada awalnya, Islam tumbuh dan berkembang dengan damai di kota Mekah dan Madinah di Arab Saudi. Setelah kematian Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi, terjadi perselisihan antara para pengikutnya mengenai siapa yang akan menjadi khalifah atau pemimpin umat Muslim. Salah satu konflik awal dalam sejarah Islam adalah perselisihan antara kelompok yang menginginkan Ali bin Abi

Thalib sebagai khalifah dan kelompok yang mendukung Muawiyah sebagai khalifah setelah kematian Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 656 Masehi. Perselisihan ini menjadi awal dari perpecahan antara kaum Sunni dan Syiah. Konflik antara kedua kelompok ini terus berlanjut hingga hari ini, dengan puncaknya terjadi di Irak dan Suriah.

Secara keseluruhan, sejarah konflik di dunia Islam sangat kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti perbedaan agama, politik, kekuasaan, dan pengaruh asing. Konflik ini seringkali berdampak negatif pada masyarakat dan kesejahteraan ekonomi di wilayah tersebut.

Konflik di dunia Islam juga terjadi karena faktor politik. Banyak negara Muslim yang telah mengalami pergantian pemerintahan melalui kudeta, pemberontakan, atau invasi asing. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan politik dan kekacauan di banyak negara Islam. Sebagai contoh, di Mesir, terdapat pergeseran kekuasaan yang berulang-ulang, dari kekuasaan monarki menjadi pemerintahan militer dan kemudian pemerintahan sipil.

Konflik di dunia Islam juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Banyak negara Islam yang mengalami kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Beberapa negara Islam memiliki kekayaan alam yang melimpah, seperti minyak bumi dan gas alam, namun kekayaan tersebut tidak selalu dirasakan oleh rakyatnya. Korupsi dan ketidakadilan sosial seringkali menjadi sumber ketidakpuasan rakyat, yang kemudian memunculkan aksi-aksi protes dan pemberontakan.

Pada abad ke-8, muncul konflik antara khalifah Abbasiyah dan Bani Umayyah yang masih memiliki dukungan di Andalusia, Spanyol. Konflik ini akhirnya berakhir pada tahun 750 Masehi, ketika Abbasiyah berhasil merebut kekuasaan dan memindahkan ibu kota ke Baghdad.

Pada abad ke-11, dunia Islam dilanda perang Salib, yang dimulai pada tahun 1095 Masehi ketika Paus Urban II menyerukan perang suci melawan

Islam. Perang ini berlangsung selama beberapa abad dan memunculkan banyak konflik antara dunia Islam dan dunia Kristen. Meskipun perang Salib tidak berhasil merebut kembali Yerusalem, tetapi mereka berhasil mendirikan kerajaan Kristen di Levant, yang kemudian menjadi bumerang bagi dunia Islam.

Pada abad ke-13, Mongol menyerang dunia Islam dan menaklukkan Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Penaklukan ini menghancurkan kekuasaan Abbasiyah dan menjadi awal dari periode ketidakstabilan di wilayah tersebut.

Pada abad ke-16, terjadi konflik antara Utsmani dan Safawi di wilayah Timur Tengah. Konflik ini dipicu oleh perbedaan keyakinan agama dan kekuasaan politik, serta persaingan antara kedua kekuatan besar tersebut dalam menguasai wilayah Asia Tengah.

Sejarah Turki Usmani, salah satu kerajaan Islam terbesar di dunia pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, tidak dapat dipisahkan dari sejarah Perang Dunia I. Di tengah pergolakan dunia akibat perang yang sedang berkecamuk, Turki Usmani mengalami masa-masa sulit dan akhirnya runtuh. Salah satu faktor yang turut mempengaruhi runtuhnya Turki Usmani adalah intervensi intelijen Inggris, yang dipimpin oleh tokoh yang dikenal sebagai Lawrence of Arabia.

Lawrence of Arabia memiliki nama lengkap Thomas Edward Lawrence. Lawrence adalah seorang agen intelijen Inggris yang bekerja untuk Badan Intelijen Inggris di Kairo, yang terkenal karena berhasil memimpin pemberontakan Arab melawan Turki Usmani. Ia dikenal sebagai tokoh yang cerdas, taktis, dan penuh trik dalam memimpin perang gerilya.

Sebelum memimpin pemberontakan Arab, Lawrence telah terlibat dalam sejumlah misi intelijen Inggris di Timur Tengah. Salah satu misinya adalah membantu membuka rute perkapalan di Teluk Aqaba, yang pada saat

itu diawasi ketat oleh Turki Usmani. Lawrence berhasil memimpin serangan di Aqaba dan memenangkan pertempuran tersebut.

Setelah sukses di Aqaba, Lawrence mendapat tugas baru untuk membantu pemberontakan Arab melawan Turki Usmani. Dalam misi ini, ia berhasil membangun hubungan dekat dengan pemimpin-pemimpin pemberontakan Arab. Lawrence juga memimpin dan mengkoordinasi serangan terhadap kereta api milik Kesultanan Utsmaniyah yang mengangkut persenjataan dan bahan bakar untuk pasukan mereka di seluruh wilayah Timur Tengah. Dalam serangan ini, Lawrence memimpin serangan dengan menggunakan metode gerilya dan berhasil menghancurkan banyak kereta api milik Kesultanan Turki Usmani. Bersama-sama, mereka berhasil merebut beberapa wilayah di Arab dan menimbulkan kerugian besar bagi Turki Usmani.

Beberapa penelitian dan artikel juga menyoroti peran Lawrence of Arabia dalam menghancurkan Turki Usmani. Dalam artikel yang diterbitkan di jurnal berbahasa Inggris, "Lawrence of Arabia and the Fall of the Ottoman Empire", terdapat analisis mendalam tentang peran Lawrence dalam mengorganisir pemberontakan Arab dan strategi yang digunakannya untuk memenangkan perang. Penulis artikel tersebut, John C. Walcott, juga menyoroti kontroversi yang terkait dengan peran Lawrence dalam menghancurkan Turki Usmani, termasuk keterlibatannya dalam penentuan perbatasan antara Arab dan Yahudi di wilayah Palestina.

Selain itu, ada pula penelitian yang menyoroti faktor-faktor lain yang mempengaruhi runtuhnya Turki Usmani, termasuk faktor ekonomi dan sosial-politik. Dalam buku "The Collapse of the Ottoman Empire: 1914-1921", penulis Alan Palmer menjelaskan bahwa Turki Usmani mengalami tekanan ekonomi yang besar akibat terlibat dalam Perang Dunia I dan pengaruh kolonialisme Eropa yang semakin kuat.

Pada bulan Oktober 1918, Kesultanan Utsmaniyah menyerah kepada Sekutu dan dengan demikian berakhir Perang Dunia I di Timur Tengah. Selama berabad-abad, Kesultanan Utsmaniyah telah mengendalikan wilayah ini, tetapi pada abad ke-20, kekuasaannya terancam oleh kekuatan Eropa yang semakin kuat. Dalam upaya untuk memperoleh kembali kekuasaan atas wilayah-wilayah ini, Kesultanan Utsmaniyah bersekutu dengan Jerman dan Austria-Hongaria pada Perang Dunia I.

Namun, kemenangan ini tidak berlangsung lama. Setelah kekalahan Turki Usmani dalam Perang Dunia I, wilayah kekuasaan mereka di Timur Tengah dipecah dan dibagi-bagi oleh para pemenang perang. Hal ini berdampak pada runtuhnya Turki Usmani dan berakhirnya masa kejayaan Islam di wilayah tersebut.

Setelah intelijen dan militer Inggris yang dipimpin Lawrence berhasil memecah Turki dengan Arab, selanjutnya pada abad ke-19, Inggris dan Perancis mulai menguasai banyak wilayah di dunia Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penjajahan ini memunculkan banyak konflik antara dunia Islam dan negara-negara kolonial tersebut. Pada masa ini juga, muncul konflik lain yang muncul di awal abad ke-20 adalah akhirnya negara Israel yang diinisiasi oleh Inggris dan Amerika Serikat, yang berdampak pada penghancuran negara Palestina. Konflik Israel-Palestine terus berlangsung hingga saat ini. Konflik ini bermula sejak tahun 1948 ketika negara Israel didirikan dan mengakibatkan pengusiran ribuan orang Palestina dari tanah mereka. Konflik ini telah memakan korban jiwa dan mengakibatkan ketidakstabilan politik di wilayah Timur Tengah. Upaya untuk mencapai perdamaian antara kedua belah pihak telah dilakukan, termasuk melalui konferensi-konferensi internasional dan upaya-upaya diplomatik, namun hingga saat ini belum ada solusi yang memuaskan untuk kedua belah pihak.

Pada saat itu, faktor agama juga memainkan peran penting dalam terjadinya konflik dan dinamika pergerakan politik di dunia Islam. Terdapat banyak perbedaan pendapat dalam Islam mengenai interpretasi teks suci dan ajaran agama. Perbedaan pandangan ini seringkali memunculkan konflik di antara umat Muslim.

Pada awal abad ke-20, terdapat pergerakan reformis dalam Islam yang menuntut modernisasi, terutama di wilayah Mesir. Sayyid Qutb, seorang tokoh gerakan Ikhwanul Muslimin (The Muslim Brotherhood), mengkritik kebijakan pemerintah Mesir yang dianggapnya tidak menerapkan prinsip-prinsip Islam dengan benar. Pada tahun 1966, ia dieksekusi oleh pemerintah Mesir karena dianggap sebagai ancaman terhadap negara.

Konflik terbesar di dunia Islam terjadi di Iran pada tahun 1979. Revolusi Islam di Iran dipimpin oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini, yang menggulingkan pemerintah Shah Mohammad Reza Pahlavi yang pro-Barat. Setelah Khomeini berkuasa, ia mengganti sistem pemerintahan negara menjadi negara Islam dan memimpin Iran dengan hukum Syariah. Hal ini menimbulkan ketegangan dengan negara-negara Barat dan Amerika Serikat yang memandang Iran sebagai ancaman bagi stabilitas regional.

Pada abad ke-20, banyak negara Islam mengalami perubahan politik yang signifikan. Setelah Perang Dunia II, banyak negara Islam meraih kemerdekaan, tetapi seringkali diwarnai dengan konflik dan pergolakan politik. Pada awal abad ke-20, terdapat beberapa gerakan nasionalisme yang muncul di berbagai negara Islam di dunia, seperti Mesir, Turki, dan Iran. Namun, gerakan nasionalisme ini tidak selalu membawa kedamaian dan keselarasan dalam dunia Islam. Sebaliknya, gerakan nasionalisme ini justru memunculkan konflik-konflik yang berdampak negatif pada dunia Islam.

Salah satu konflik besar di dunia Islam adalah konflik antara Arab Saudi dan Iran. Konflik ini bermula dari perbedaan dalam pandangan

keagamaan dan politik antara kedua negara tersebut. Arab Saudi adalah negara dengan mayoritas penduduk Sunni, sedangkan Iran adalah negara dengan mayoritas penduduk Syiah. Kedua negara ini juga memiliki perbedaan dalam pandangan politik regional dan global, seperti dalam hal dukungan terhadap pihak-pihak yang berkonflik di Suriah dan Yaman.

Konflik antara Arab Saudi dan Iran memiliki dampak yang cukup signifikan pada dunia Islam. Konflik ini memunculkan ketegangan dan kerusuhan di berbagai negara Islam di Timur Tengah, seperti Yaman, Suriah, dan Irak. Konflik ini juga memunculkan ketidakstabilan di pasar minyak dunia, karena Arab Saudi dan Iran adalah dua produsen terbesar untuk komoditas minyak dunia.

Konflik berlanjut pada tahun 1980 ketika Irak menyerbu Iran dan memicu Perang Iran-Irak yang berlangsung selama delapan tahun. Perang ini menewaskan ratusan ribu orang dari kedua belah pihak dan menghancurkan infrastruktur di kedua negara. Konflik ini dianggap sebagai salah satu perang terpanjang dan terbanyak korban di dunia Islam.

Konflik lainnya yang terjadi adalah konflik di Timur Tengah, terutama konflik antara Israel dan Palestina. Konflik ini bermula pada awal abad ke-20 ketika Zionisme, gerakan nasional Yahudi, mulai berkembang di Palestina. Setelah Perang Dunia II, Israel didirikan di wilayah Palestina pada tahun 1948. Sejak itu, konflik antara Israel dan Palestina terus berlanjut hingga saat ini.

Selain itu, terdapat juga konflik di wilayah Asia Tenggara, khususnya di Filipina dan Indonesia. Di Filipina, terdapat konflik antara pemerintah Filipina dengan gerakan separatis Moro Islamic Liberation Front (MILF) yang ingin memisahkan diri dari negara Filipina dan membentuk negara Islam sendiri di wilayah Mindanao. Sedangkan di Indonesia, terdapat konflik di wilayah Aceh yang dipicu oleh gerakan separatisme GAM (Gerakan Aceh

Merdeka) yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk negara Islam Aceh.

Namun, tidak semua konflik di dunia Islam bersifat sektarian. Beberapa konflik yang terjadi di wilayah Afrika Utara dan Timur Tengah juga berkaitan dengan perebutan kekuasaan dan pengaruh regional, seperti konflik di Suriah dan Libya.

Belakangan ini, konflik yang terjadi dalam dunia Islam juga melibatkan kelompok-kelompok militan seperti Al-Qaida dan ISIS yang melakukan serangkaian serangan teror di berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia. Kelompok-kelompok tersebut menunjukkan adanya kekerasan dan ekstremisme yang menjadi ancaman bagi stabilitas dan perdamaian dunia.

Kesimpulannya, sejarah dunia Islam telah mengalami banyak konflik, baik yang bersifat sektarian maupun bukan. Konflik tersebut terjadi karena berbagai faktor, seperti perbedaan ideologi, kepentingan politik, dan perebutan kekuasaan. Untuk elaborasi lebih lanjut, dapat merujuk pada daftar bacaan berikut ini:

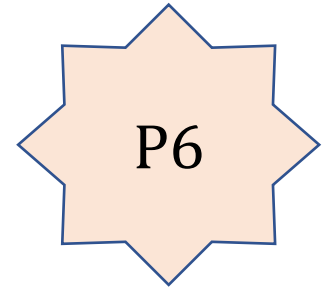
1. Anderson, B. (2017). *Lawrence in Arabia: War, Deceit, Imperial Folly and the Making of the Modern Middle East*. Profile Books.
2. Fromkin, D. (1989). *A Peace to End All Peace: The Fall of the Ottoman Empire and the Creation of the Modern Middle East*. Holt, Rinehart and Winston.
3. Morris, J. (2002). *The Two Faces of Arab Nationalism*. *The New Republic*, 226(5), 27-39.
4. Tripp, C. (2015). *The Power and the People: Paths of Resistance in the Middle East*. Cambridge University Press.
5. Tucker, S. C. (2010). *The Great War and the Middle East*. Oxford University Press.

6. Anderson, M. S. (1981). *The eastern question, 1774-1923: a study in international relations*. Routledge & Kegan Paul.
7. Fromkin, D. (1989). *A peace to end all peace: The fall of the Ottoman empire and the creation of the modern Middle East*. Holt, Rinehart, and Winston.
8. Karsh, E. (1996). *The Middle East and North Africa in world politics: A documentary record*. Yale University Press.
9. Keegan, J. (1998). *The first world war*. Vintage Books.
10. Lawrence, T. E. (2003). *Seven pillars of wisdom: A triumph: The complete 1922 "Oxford" text*. Penguin Classics.
11. Morris, B. (2008). *1948: A history of the first Arab-Israeli war*. Yale University Press.
12. Rogan, E. (2015). *The fall of the Ottomans: The great war in the Middle East*. Basic Books.
13. Thomas, H. (2011). *The war to end all wars: The American military experience in World War I*. University Press of Kentucky.
14. Woodward, D. R. (1998). *Field Marshal Sir William Robertson*. Praeger Publishers.

TUGAS PERKULIAHAN SELANJUTNYA

- Mahasiswa secara berkelompok menentukan poin-poin utama sejarah persatuan dan perpecahan di dunia Islam
- Selanjutnya, poin-poin tersebut akan didiskusikan dalam kelas selanjutnya.

Good Governance dan Anti-Korupsi di Negara-negara Islam



CAPAIAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa memahami dan bisa menjelaskan tentang kondisi dan tantangan tata kelola pemerintahan dan juga agenda anti-korupsi di negara-negara Islam.

GOOD GOVERNANCE DI DUNIA ISLAM

Pengelolaan pemerintahan dan agenda anti-korupsi adalah masalah yang sering menjadi sorotan di banyak negara di dunia, termasuk negara-negara Islam. Berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi oleh negara-negara Islam dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif tidaklah mudah. Faktor seperti tradisi, budaya, politik, agama, dan sejarah seringkali mempengaruhi cara negara-negara Islam mengelola pemerintahan mereka dan memerangi korupsi.

Tantangan pemerintahan dan korupsi di negara-negara Islam dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Pertama, masalah politik dan keamanan seperti konflik dan ketidakstabilan politik yang dapat mempengaruhi efektivitas pemerintahan. Kedua, faktor budaya dan sosial seperti kurangnya transparansi, partisipasi masyarakat, dan budaya patronase. Ketiga, faktor ekonomi seperti ketidakseimbangan pembangunan dan peningkatan kemiskinan yang dapat memicu korupsi.

Agenda anti-korupsi di negara-negara Islam telah menjadi perhatian yang semakin penting dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terlihat dari berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, LSM, dan masyarakat dalam memerangi korupsi. Di banyak negara Islam, telah dibuat kebijakan anti-korupsi, dibentuk lembaga anti-korupsi, dan didirikan mekanisme pengaduan publik. Namun, upaya-upaya ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan seperti kurangnya sumber daya, kurangnya kemauan politik, dan kekurangan transparansi.

Tantangan tata kelola pemerintahan di negara-negara Islam tidak hanya terkait dengan isu keamanan dan stabilitas politik, tetapi juga meliputi isu-isu kebijakan publik, hak asasi manusia, dan demokrasi. Korupsi dan nepotisme, misalnya, telah menjadi masalah yang umum terjadi di banyak negara Islam, dan menjadi salah satu tantangan utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Negara-negara Islam memiliki berbagai macam karakteristik dan tantangan yang unik terkait dengan tata kelola pemerintahan. Beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Turki telah mencapai kemajuan dalam menjalankan praktik tata kelola yang lebih baik, sedangkan negara-negara seperti Iran, Sudan, dan Suriah menghadapi tantangan besar terkait hak asasi manusia, otoritarianisme, dan korupsi.

Peran Islam dalam tata kelola pemerintahan telah menjadi perdebatan yang hangat di antara para cendekiawan. Beberapa kelompok Islamis, seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir, telah memperjuangkan penerapan hukum Syariah sebagai bentuk tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Namun, pendapat ini masih menjadi perdebatan dan kontroversial di banyak negara Islam lainnya.

Pemerintahan yang baik dan bersih merupakan prasyarat penting untuk memajukan pembangunan ekonomi dan sosial di negara-negara

Islam. Perbaikan tata kelola pemerintahan dan pengendalian korupsi telah menjadi fokus utama banyak organisasi internasional seperti Bank Dunia dan PBB.

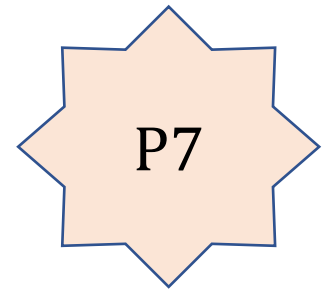
Sejumlah faktor dapat mempengaruhi tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di negara-negara Islam, termasuk sistem politik, budaya politik, kebijakan publik, dan peran masyarakat sipil. Dalam beberapa kasus, faktor-faktor ini saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Sistem politik di negara-negara Islam juga memainkan peran penting dalam menentukan tata kelola pemerintahan yang baik. Negara-negara seperti Iran dan Arab Saudi, yang memiliki sistem politik otoritarian, sering dianggap memiliki tata kelola pemerintahan yang buruk dan korup. Di sisi lain, negara-negara seperti Indonesia dan Turki, yang telah melakukan reformasi politik menuju demokrasi, telah mencapai kemajuan dalam tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Untuk elaborasi lebih lanjut, silakan baca sejumlah daftar bacaan berikut ini:

1. Abdo, G. (2019). The Challenges of Governance in the Arab World. *Journal of Governance and Regulation*, 8(4), 25-31.
2. Al-Sharmani, M. (2018). Governance and Anti-Corruption in the Arab Region: Challenges and Opportunities. *Journal of Development Policy and Practice*, 3(1), 1-16.
3. Azmi, S. H. (2015). Anti-Corruption in Malaysia: A Comprehensive Approach. *Journal of Business and Management Sciences*, 3(6), 165-172.
4. Hussain, M. A., & Ramli, R. (2017). Corruption and its Impact on Economic Growth: A Comparative Study of Pakistan and Bangladesh. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 38(4), 1-28.

5. Ibrahim, S. (2018). Governance, Democracy and Anti-Corruption in the Arab World. *Journal of Governance and Regulation*, 7(4), 1-7.
6. Islam, M. S. (2016). The Challenges of Governance and Anti-Corruption in Bangladesh. *Journal of Business and Management Sciences*, 4(2), 57-62.
7. Rahman, M. H. (2016). Governance and Anti-Corruption in Bangladesh: Challenges and Opportunities. *Journal of Governance and Regulation*, 5(1), 73-84.
8. Smith, D. C. (2015). Governance and Anti-Corruption in Indonesia: Challenges and Opportunities. *Journal of Business and Management Sciences*, 3(3), 66-75.
9. United Nations Development Programme (UNDP). (2018). *Arab Human Development Report 2016: Youth and the Prospects for Human Development in a Changing Reality*. New York: United Nations Development Programme.
10. World Bank. (2017). *Worldwide Governance Indicators*. Washington, DC: World Bank.

TANTANGAN TERORISME & RADIKALISME ISLAM TERHADAP KEAMANAN GLOBAL



CAPAIAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa diharapkan bisa memahami dan bisa menjelaskan tentang tantangan terorisme dan radikalisme Islam terhadap keamanan global, termasuk juga mengantisipasi pandangan sempit yang sering melabelkan atau men-*stereotype* Islam sebagai sarang teroris sebagai ekspresi Islamophobia yang perlu diluruskan.

ANCAMAN TERORISME & RADIKALISME

Pengaruh terorisme dan radikalisme Islam terhadap keamanan global menjadi isu yang semakin mendesak untuk dibahas. Fenomena ini telah membawa dampak serius bagi stabilitas keamanan internasional dan memperburuk hubungan antarnegara. Terorisme dan radikalisme tidak hanya menjadi masalah negara tertentu, tetapi juga menjadi ancaman global. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi dalam menghadapi fenomena ini membutuhkan pendekatan yang serius dan terpadu.

Sejarah terorisme dan radikalisme Islam diawali dengan munculnya gerakan militan di dunia Islam pada awal 1980-an. Saat itu, militan Islam menghadapi musuh baru dalam bentuk pendudukan Soviet di Afghanistan. Pada saat yang sama, gerakan Islam militan mulai memperoleh dukungan dari beberapa negara di Timur Tengah. Namun, pada akhirnya dukungan ini membawa dampak negatif pada stabilitas global karena sebagian besar

gerakan militan ini bertujuan untuk melawan negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat.

Faktor utama yang menyebabkan terorisme dan radikalisme Islam masih menjadi ancaman global adalah adanya faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi yang menyebabkan munculnya kelompok-kelompok radikal di dalam masyarakat Islam. Beberapa faktor tersebut di antaranya adalah ketidakpuasan terhadap pemerintahan yang korup dan otoriter, ketidakadilan sosial dan ekonomi, serta kurangnya kesempatan untuk berkembang dan menciptakan perubahan positif dalam masyarakat.

Dalam menghadapi tantangan terorisme dan radikalisme Islam, negara-negara harus melakukan pendekatan yang beragam dan terintegrasi. Pendekatan ini harus mencakup tiga aspek utama, yaitu preventif, repressif, dan rehabilitatif. Aspek preventif mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya aksi terorisme dan radikalisme, seperti mengembangkan program-program pendidikan dan sosial yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya terorisme dan radikalisme. Aspek repressif mencakup tindakan yang dilakukan untuk menindak para pelaku terorisme dan radikalisme, baik secara hukum maupun militer. Sedangkan aspek rehabilitatif mencakup tindakan-tindakan untuk merangkul kelompok-kelompok radikal agar tidak terjerumus ke dalam aksi terorisme.

Namun, selain melakukan pendekatan preventif, repressif, dan rehabilitatif, penanggulangan terorisme dan radikalisme juga harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, khususnya masyarakat Muslim. Masyarakat Muslim harus diberdayakan untuk mengambil peran dalam upaya pencegahan terorisme dan radikalisme dengan mengembangkan narasi-narasi Islam yang moderat dan menentang kekerasan. Selain itu, negara-negara juga harus bekerja sama dalam

memerangi terorisme dan radikalisme, baik di tingkat regional maupun global.

Pada tahun 2014, ISIS secara resmi mendeklarasikan pembentukan negara Islam atau khilafah di wilayah Suriah dan Irak, dan mulai melakukan ekspansi ke berbagai negara lain di dunia, termasuk di Asia Tenggara. Dalam prosesnya, ISIS berhasil merekrut banyak anggota dari berbagai negara, termasuk dari Indonesia.

Berdasarkan data dari Pusat Studi Terorisme dan Konflik (PTSK) Universitas Indonesia, hingga tahun 2020 tercatat lebih dari 600 orang dari Indonesia bergabung dengan ISIS di Suriah dan Irak. Meskipun ISIS sudah mulai kehilangan wilayah kekuasaannya di Suriah dan Irak, ancaman terorisme dan radikalisme Islam masih tetap ada di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia.

Dalam melawan terorisme dan radikalisme Islam, perlu juga dilakukan upaya untuk mencegah terjadinya perekrutan teroris di kalangan pemuda dan remaja yang rentan terpengaruh oleh propaganda radikal. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memberikan pendidikan dan pelatihan yang memadai serta membangun hubungan yang baik antara masyarakat dan aparat keamanan.

Selain itu, penting juga untuk memperhatikan pengaruh internet dan media sosial dalam penyebaran ideologi radikal dan propaganda teroris. Pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama melakukan upaya untuk memonitor dan mengontrol konten yang berpotensi merusak dan mengajarkan kebencian.

Dalam konteks global, kerja sama internasional sangat penting dalam memerangi terorisme dan radikalisme Islam. Negara-negara di seluruh dunia perlu saling berbagi informasi dan pengalaman dalam melawan

terorisme, serta meningkatkan kerja sama dalam hal pencegahan dan penanggulangan terorisme.

Di samping itu, perlu juga diadakan dialog dan interaksi antara negara-negara Islam dan negara-negara Barat untuk memperbaiki pemahaman dan persepsi terhadap Islam dan mencegah adanya Islamophobia. Hal ini penting agar tidak terjadi diskriminasi dan polarisasi yang memperburuk situasi dan menambah ketegangan antar kelompok di masyarakat.

Kesimpulannya, terorisme dan radikalisme Islam merupakan tantangan besar yang mempengaruhi keamanan global. Penanganan terorisme dan radikalisme Islam tidak bisa dilakukan secara sepihak, melainkan membutuhkan kerja sama dan upaya bersama dari negara-negara di seluruh dunia.

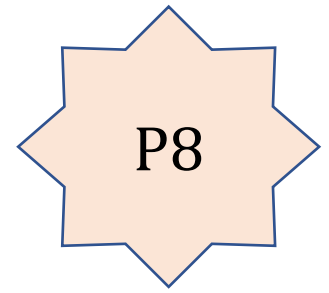
Di samping itu, juga perlu diadakan upaya untuk mencegah terjadinya perekrutan teroris dan membangun hubungan yang baik antara masyarakat dan aparat keamanan. Pengaruh internet dan media sosial juga perlu diperhatikan dalam penyebaran ideologi radikal dan propaganda teroris.

Dalam konteks global, kerja sama internasional sangat penting dalam memerangi terorisme dan radikalisme Islam. Di samping itu, juga perlu diadakan dialog dan interaksi antara negara-negara Islam dan negara-negara Barat untuk memperbaiki pemahaman dan persepsi terhadap Islam dan mencegah adanya Islamophobia. Untuk pemahaman lebih lanjut, bisa menelusuri bahan bacaan berikut ini:

1. Abbas, T. (2021). Islamist Terrorism: The Changing Landscape. The Diplomat. Retrieved from <https://thediplomat.com/2021/01/islamist-terrorism-the-changing-landscape/>

2. Global Counterterrorism Forum (2021). About. Retrieved from <https://www.thegctf.org/About>
3. Huda, S. (2021). Countering Terrorism and Radicalization: What Can Be Done? ThoughtCo. Retrieved from <https://www.thoughtco.com/countering-terrorism-and-radicalization-4082461>
4. International Center for Counter-Terrorism (ICCT) (2021). What Is Terrorism? Retrieved from <https://icct.nl/about/what-is-terrorism/>
5. United Nations Office of Counter-Terrorism (UNOCT) (2021). About Us. Retrieved from <https://www.un.org/counterterrorism/about-us>
6. Bari, A. (2017). The Dynamics of Islamic Radicalization: A Systematic Review. *Journal of Religion and Violence*, 5(2), 1-23.
7. Bertrand, J. (2018). ISIS and Al Qaeda: The Future of Terrorism. *Perspectives on Terrorism*, 12(1), 92-99.
8. Cronin, A. K. (2019). The Battle for the New Islamic Heartlands: ISIS and the War for Southeast Asia. *Foreign Affairs*, 98, 127-137.
9. Enders, W., & Sandler, T. (2018). *The Political Economy of Terrorism*. Cambridge University Press.
10. Gerges, F. A. (2017). *ISIS: A History*. Princeton University Press.
11. Gunaratna, R. (2017). *Countering the New Terrorism*. Springer.
12. Hoffman, B. (2018). *Inside Terrorism*. Columbia University Press.
13. Jenkins, B. M. (2018). *The Future of Terrorism*. Routledge.
14. Kepel, G. (2017). *The Roots of Radicalism: The Theory and Practice of Contemporary Islamic Terrorism*. Routledge.
15. Stern, J. (2018). *ISIS: The State of Terror*. Harper Collins.

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)



CAPAIAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa akan diberikan sejumlah soal untuk dijawab dan elaborasi lebih lanjut, terkait dengan tema-tema yang telah dijelaskan sebelumnya. Teknik pengumpulan dan penilaian disampaikan kepada mahasiswa, yang juga tergambar dalam penjelasan awal di dokumen ini.

DINAMIKA POLITIK ISLAM DI TIMUR TENGAH



P9

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan memperoleh pemahaman dan menguasai tentang sejarah dinamika politik Islam di Kawasan Jazirah Arab atau Timur Tengah yang menjadi fokus perhatian dunia internasional pasca Perang Dunia I dan Perang Dunia II

MATERI PEMBELAJARAN

Kawasan Timur Tengah selalu menjadi wilayah yang strategis karena kaya akan sumber daya alam dan letaknya yang strategis antara tiga benua yaitu Afrika, Asia, dan Eropa. Di dalamnya terdapat berbagai macam suku bangsa, agama, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Namun, salah satu ciri khas dari kawasan ini adalah adanya pengaruh besar agama Islam terhadap politik di negara-negara di Timur Tengah.

Politik Islam telah menjadi faktor penting dalam dinamika politik di kawasan ini selama beberapa dekade terakhir. Pada awal abad ke-20, sebagian besar kawasan Timur Tengah berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Ottoman. Namun, pada akhir Perang Dunia I, kekuatan-kekuatan kolonial Eropa seperti Inggris dan Perancis mulai mencampuri urusan politik kawasan ini. Mereka membagi-bagi kawasan ini menjadi negara-negara kecil yang terpisah-pisah, dengan tujuan memudahkan kontrol atas sumber daya alamnya.

Proses pembagian tersebut menciptakan ketidakstabilan politik di kawasan Timur Tengah. Negara-negara baru ini seringkali memiliki batas-batas yang tidak jelas, budaya dan bahasa yang berbeda, serta latar belakang

sejarah yang saling bertentangan. Sebagai akibatnya, muncul gerakan nasionalisme yang memperjuangkan penggabungan kembali negara-negara tersebut, di bawah satu pemerintahan yang kuat dan bersatu.

Namun, gerakan nasionalisme tidaklah homogen di kawasan ini, terutama dalam hal pandangan politik. Salah satu isu penting dalam gerakan nasionalisme adalah bagaimana memadukan identitas nasional dengan identitas agama. Hal ini memunculkan gerakan-gerakan politik Islam di kawasan Timur Tengah yang melihat Islam sebagai landasan identitas nasional.

Salah satu gerakan politik Islam yang paling terkenal di kawasan Timur Tengah adalah Ikhwanul Muslimin atau Muslim Brotherhood. Gerakan ini didirikan di Mesir pada tahun 1928 oleh Hasan al-Banna. Tujuan utama gerakan ini adalah untuk memperjuangkan Islam sebagai ideologi politik dan untuk membangun negara yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam.

Pada masa pasca-kolonial, gerakan politik Islam semakin populer di kawasan Timur Tengah. Gerakan ini menjadi semakin radikal dan berbagai kelompok militan seperti Hamas di Palestina dan Hizbullah di Lebanon mulai muncul. Beberapa kelompok ini bahkan menggunakan taktik terorisme untuk mencapai tujuan politik mereka.

Setelah Perang Dunia II, Timur Tengah mengalami periode yang panjang dan kompleks dalam sejarahnya. Banyak negara yang baru saja merdeka dan terjebak dalam dinamika politik yang berubah-ubah. Tantangan politik dan ekonomi pun semakin terasa di negara-negara ini. Dalam konteks ini, politik Islam menjadi sebuah pilihan yang signifikan bagi banyak orang di Timur Tengah untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi.

Di antara berbagai gerakan politik Islam, ada beberapa gerakan yang memilih untuk mengambil jalur politik institusional seperti Partai Islam Iran dan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) di Turki. Ada juga gerakan yang cenderung memilih jalur kekerasan seperti Al-Qaeda dan ISIS. Seiring berjalannya waktu, gerakan politik Islam juga mengalami perubahan dan perkembangan. Berikut adalah sejarah dinamika politik Islam di Timur Tengah.

Gerakan politik Islam di Timur Tengah memiliki akar yang sangat kuat dalam sejarah panjang Islam itu sendiri. Sejak awal mula munculnya Islam pada abad ke-7, politik dan agama selalu saling terkait erat. Pemimpin-pemimpin Muslim pada masa itu adalah sekaligus pemimpin politik dan agama yang bertanggung jawab atas semua urusan negara dan kehidupan masyarakat.

Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan sejarah, peran politik dan agama mulai terpisah. Pada abad ke-19, muncul gerakan reformasi Islam seperti Wahhabi di Arab Saudi dan Sanusi di Libya yang ingin mengembalikan Islam ke dalam kehidupan politik dan sosial. Di Turki, gerakan modernis seperti Young Turks juga berusaha memisahkan agama dan negara.

Namun, pada awal abad ke-20, gerakan politik Islam kembali muncul di Timur Tengah. Gerakan ini dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Hasan al-Banna di Mesir dan Abu Ala Maududi di India. Mereka menganggap bahwa Islam harus menjadi sumber inspirasi bagi politik dan sosial serta menyatukan umat Muslim di seluruh dunia.

Pada era 1970-an, gerakan politik Islam mencapai puncaknya di Timur Tengah. Di Iran, terjadi Revolusi Islam yang dipimpin oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini dan menggulingkan Shah Mohammad Reza Pahlavi. Di

Arab Saudi, gerakan Salafi mulai berkembang pesat dan mendapat dukungan dari pemerintah.

Di Mesir, gerakan Ikhwanul Muslimin (Persaudaraan Muslim) semakin kuat dan mampu memenangkan kursi di parlemen. Gerakan yang didirikan oleh Hasan al-Banna ini memiliki basis massa yang kuat dan mempunyai jaringan yang luas di seluruh Timur Tengah. Gerakan politik Islam juga muncul di negara-negara seperti Tunisia, Maroko, dan Sudan.

Salah satu bentuk politik Islam yang muncul di Timur Tengah adalah gerakan Islamisme, yang memperjuangkan penerapan syariat Islam sebagai dasar hukum dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Gerakan ini berkembang pesat setelah Perang Dunia II dan terus menjadi kekuatan politik penting di kawasan ini.

Di Mesir, gerakan Islamisme berkembang melalui kelompok-kelompok seperti Ikhwanul Muslimin atau Persaudaraan Muslim. Kelompok ini didirikan pada 1928 oleh Hasan al-Banna dan mengusung agenda politik Islam yang meliputi penerapan syariat Islam dan penghapusan kolonialisme. Persaudaraan Muslim menjadi organisasi politik terbesar di Mesir dan memainkan peran penting dalam pergerakan kemerdekaan Mesir.

Di Iran, gerakan Islamisme berkembang melalui Revolusi Islam 1979 yang dipimpin oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini. Revolusi ini menggulingkan Shah Iran dan mendirikan negara Islam di Iran yang mengusung penerapan syariat Islam dalam kehidupan negara. Revolusi ini juga mempengaruhi gerakan Islamisme di kawasan Timur Tengah dan membawa perubahan signifikan dalam politik regional.

Namun, gerakan Islamisme juga menimbulkan kontroversi dan kritik dari kalangan lain, terutama terkait dengan kebijakan sosial yang diterapkan, termasuk hak perempuan dan hak minoritas agama. Selain itu, terdapat juga gerakan radikal yang menggunakan kekerasan sebagai cara

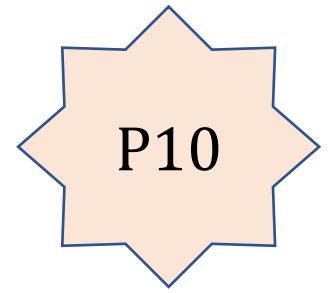
untuk memperjuangkan agenda politik Islam, seperti kelompok terorisme seperti Al-Qaida dan ISIS.

Sejarah dinamika politik Islam di Timur Tengah juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti campur tangan negara-negara Barat dalam politik regional dan konflik Arab-Israel yang belum terselesaikan. Konflik ini telah mempengaruhi stabilitas politik di kawasan ini dan menjadi tantangan bagi pengembangan demokrasi dan keamanan regional.

Meskipun demikian, gerakan Islamisme tetap menjadi kekuatan politik penting di Timur Tengah, dan isu-isu politik Islam terus menjadi fokus perhatian di kawasan ini. Perkembangan politik Islam di Timur Tengah akan terus berdampak pada kebijakan luar negeri negara-negara Barat dan juga pada stabilitas politik dan keamanan regional. Beberapa referensi yang dapat digunakan dalam penulisan artikel ini antara lain:

1. Esposito, J. L. (2010). *The future of Islam*. Oxford University Press.
2. Kamrava, M. (2013). *The modern Middle East: A political history since the First World War*. University of California Press.
3. Roy, O. (2011). *The failure of political Islam*. Harvard University Press.
4. Sachedina, A. A. (2009). *The Islamic roots of democratic pluralism*. Oxford University Press.
5. Shehata, S. (2013). *Islamism and democracy in Egypt: The failure of authoritarianism and the prospects for democratization*. I.B.Tauris.

DINAMIKA POLITIK ISLAM DI ASIA TENGGARA



CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan memperoleh pemahaman dan menguasai tentang sejarah dinamika politik Islam di kawasan Asia Tenggara, yang menjadi wilayah dimana negara dengan jumlah Muslim terbesar di dunia berada.

DINAMIKA ISLAM DI ASIA TENGGARA

Kawasan Asia Tenggara adalah rumah bagi banyak negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Negara-negara ini memiliki sejarah panjang yang kaya dalam budaya dan tradisi Islam, yang terus bertahan hingga saat ini. Di samping kekayaan budaya dan sejarah, Kawasan Asia Tenggara juga menghadapi berbagai tantangan dalam bidang politik dan ekonomi.

Islam telah memainkan peran penting dalam politik di Kawasan Asia Tenggara selama berabad-abad. Pada abad ke-13, Islam datang ke Indonesia melalui perdagangan dengan pedagang Arab dan India. Namun, Islam tidak menyebar secara luas di seluruh kepulauan Indonesia hingga abad ke-16, ketika pedagang-pedagang Muslim datang ke Sumatra dan menyebar ke wilayah-wilayah lainnya.

Pada saat itu, para pedagang Arab menjalin hubungan dengan pedagang-pedagang Asia Tenggara melalui jalur perdagangan yang disebut Jalur Sutra. Pada abad ke-13, kerajaan-kerajaan Islam di India mulai

memperluas wilayah mereka ke Asia Tenggara, dan dengan demikian memperkenalkan Islam kepada penduduk setempat.

Pada awalnya, masuknya Islam ke Asia Tenggara tidak terlalu terasa, dan pengaruhnya hanya terbatas pada kelompok-kelompok kecil, seperti para pedagang Arab dan orang-orang yang terlibat dalam perdagangan di kawasan ini. Namun, pada abad ke-15, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia mulai memperkuat kekuatan mereka dan memperluas pengaruh mereka di kawasan ini.

Salah satu kerajaan Islam yang terkenal di Indonesia pada saat itu adalah Kesultanan Demak. Demak merupakan pusat kekuatan Islam di Jawa pada abad ke-16 dan menjadi tempat berkumpulnya para ulama dan santri. Salah satu tokoh penting dalam sejarah Kesultanan Demak adalah Sunan Kalijaga, seorang ulama yang terkenal di Jawa dan dikenal sebagai tokoh yang sangat memperjuangkan perdamaian dan kesatuan antara umat Islam dan umat lain di kawasan ini.

Selain Demak, terdapat juga kerajaan Islam lain di Indonesia pada masa itu, seperti Kesultanan Aceh, Kesultanan Banten, dan Kesultanan Mataram. Kesultanan Aceh terkenal sebagai pusat perdagangan dan kekuatan maritim di kawasan ini. Kesultanan Banten dan Kesultanan Mataram juga memainkan peran penting dalam perkembangan Islam di Indonesia pada masa itu.

Pengaruh Islam dalam kehidupan masyarakat Asia Tenggara sudah sangat terlihat sejak awal abad ke-7 Masehi. Penyebarannya dimulai dari wilayah Arab ke wilayah Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Keberadaan Islam di Asia Tenggara seiring waktu telah menimbulkan dinamika yang unik dan berbeda dengan keadaan di wilayah lainnya. Terdapat tantangan politik dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat Islam di kawasan ini.

Di Malaysia, Islam pertama kali tiba di Malaysia pada abad ke-13, ketika pedagang-pedagang Arab dan Gujarat membawa agama ini ke kawasan tersebut. Pada abad ke-15, Kesultanan Malaka menjadi salah satu pusat penyebaran Islam di Asia Tenggara. Kesultanan Malaka didirikan oleh seorang Muslim bernama Parameswara, yang kemudian mengadopsi Islam sebagai agama negaranya. Setelah itu, Islam menyebar ke seluruh Semenanjung Malaya dan menjadi agama mayoritas di kawasan tersebut. Selama berabad-abad, Islam memainkan peran penting dalam kehidupan politik dan sosial di Malaysia. Beberapa kesultanan Islam yang terkenal di Malaysia adalah Kesultanan Johor, Kesultanan Kedah, dan Kesultanan Kelantan.

Sejak awal penyebarannya, Islam telah memainkan peran penting dalam kehidupan politik dan sosial di Malaysia. Beberapa kesultanan Islam yang terkenal di Malaysia, seperti Kesultanan Johor, Kesultanan Kedah, dan Kesultanan Kelantan, memainkan peran penting dalam sejarah politik Malaysia. Di era modern, Islam masih memainkan peran penting dalam politik dan sosial di Malaysia. Sejak kemerdekaannya pada tahun 1957, Malaysia telah dipimpin oleh partai-partai politik yang memiliki afiliasi dengan Islam, seperti Partai Islam Se-Malaysia (PAS) dan Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO).

Sementara itu, Brunei adalah salah satu negara yang memiliki mayoritas penduduk Muslim di Asia Tenggara. Islam tiba di Brunei pada abad ke-15, ketika seorang ulama dari Arab bernama Muhammad Hassan datang ke kawasan tersebut dan memperkenalkan agama ini kepada raja Brunei. Setelah itu, Islam menyebar dengan cepat di Brunei dan menjadi agama mayoritas di sana. Kesultanan Brunei yang didirikan pada abad ke-15 juga memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di kawasan ini. Pada abad ke-16, Kesultanan Brunei menjadi salah satu pusat perdagangan

dan pengaruh Islam di Asia Tenggara. Raja-raja Brunei yang memerintah negara ini selalu menganggap diri mereka sebagai pemeluk Islam yang taat. Di bawah pemerintahan Sultan Hassanal Bolkiah, Brunei telah mengadopsi hukum syariah sebagai hukum negara dan menjadi salah satu negara Islam terkonservatif di dunia.

Sementara itu, Islam tiba di Filipina Selatan pada abad ke-13, ketika pedagang-pedagang Muslim dari Brunei dan Indonesia membawa agama ini ke kawasan tersebut. Islam kemudian menyebar dengan cepat di Filipina Selatan dan menjadi agama mayoritas di sana. Beberapa kesultanan Islam yang terkenal di Filipina Selatan adalah Kesultanan Sulu dan Kesultanan Maguindanao. Kesultanan Sulu didirikan pada abad ke-15 dan menjadi salah satu pusat perdagangan dan pengaruh Islam di Asia Tenggara. Kesultanan Maguindanao, yang didirikan pada abad ke-16, juga memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Filipina Selatan. Beberapa kesultanan Islam yang terkenal di Filipina Selatan, seperti Kesultanan Sulu dan Kesultanan Maguindanao, memainkan peran penting dalam sejarah politik Filipina Selatan. Namun, di Filipina Selatan, Islam seringkali dikaitkan dengan gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari Filipina dan membentuk negara Islam sendiri. Gerakan-gerakan separatis seperti Moro Islamic Liberation Front (MILF) dan Abu Sayyaf Group (ASG) telah melakukan serangkaian aksi kekerasan untuk mencapai tujuan mereka.

Selanjutnya, Islam tiba di Thailand Selatan pada abad ke-14, ketika para pedagang-pedagang Muslim dari Gujarat dan Sumatera membawa agama ini ke kawasan tersebut. Islam kemudian menyebar dengan cepat di Thailand Selatan dan menjadi agama mayoritas di sana. Namun, Islam tidak menyebar ke seluruh Thailand, karena mayoritas penduduk Thailand menganut agama Buddha. Pada abad ke-16, Kesultanan Pattani didirikan di Thailand Selatan dan menjadi salah satu pusat penyebaran Islam di kawasan

ini. Kesultanan Pattani memainkan peran penting dalam perdagangan dan pengaruh Islam di Thailand Selatan, meskipun mayoritas penduduk Thailand menganut agama Buddha. Sejak tahun 2004, Thailand Selatan telah dilanda konflik yang memisahkan antara pemerintah Thailand dan kelompok-kelompok separatis yang mayoritas anggotanya adalah Muslim.

Dengan demikian, sejarah penyebaran Islam di Malaysia, Brunei, Filipina Selatan, dan Thailand Selatan telah memberikan pengaruh yang signifikan dalam kehidupan politik dan sosial di negara-negara ini. Sejak awal penyebarannya, Islam telah menjadi agama mayoritas di sebagian besar kawasan ini dan telah memainkan peran penting dalam pembentukan identitas dan budaya masyarakatnya.

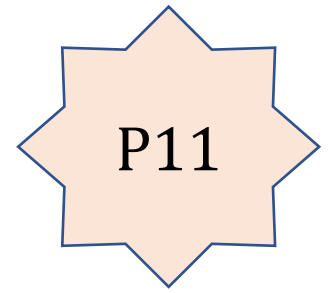
Dalam hal politik, Islam telah menjadi faktor penting dalam pembentukan negara-negara ini. Beberapa kesultanan Islam yang terkenal di Malaysia, Brunei, Filipina Selatan, dan Thailand Selatan telah memainkan peran penting dalam sejarah politik kawasan ini. Bahkan dalam era modern, Islam masih memainkan peran penting dalam politik dan sosial di negara-negara ini. Namun, Islam juga seringkali dikaitkan dengan gerakan separatis dan konflik kekerasan di beberapa negara, seperti Filipina Selatan dan Thailand Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, faktor agama dapat memicu konflik dan ketegangan di kawasan ini.

Meskipun demikian, Islam tetap menjadi bagian integral dari kehidupan politik dan sosial di Malaysia, Brunei, Filipina Selatan, dan Thailand Selatan. Dalam beberapa kasus, Islam telah memberikan pengaruh positif dalam pembangunan sosial dan ekonomi di negara-negara ini. Selanjutnya, silakan baca daftar materi berikut ini:

1. Andaya, L. Y. (2015). *The Spread of Islam in Southeast Asia*. Routledge.
2. Batara, J. (2017). *Sejarah dan Perkembangan Islam di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Gama Media.

3. Feener, R. M., & Sevea, T. (Eds.). (2017). *Islamic Connections: Muslim Societies in South and Southeast Asia*. Institute of Southeast Asian Studies.
4. Husin Ali, A. (2013). *Sejarah Islam di Malaysia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
5. Roff, W. R. (2008). *The Origins of Malay Nationalism*. Penerbit UKM.
6. Syed Abdullah, S. A. (2008). *A short history of Brunei Darussalam*. Brunei Press.
7. Zainal Abidin, N. A. (2017). *Muslim Women and Sport in Malaysia: The Hijab Issue*. In *Islamic Connections: Muslim Societies in South and Southeast Asia* (pp. 245-261). Institute of Southeast Asian Studies.

DINAMIKA POLITIK ISLAM DI ASIA SELATAN & ASIA TENGAH



CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan memperoleh pemahaman dan menguasai tentang sejarah dinamika politik Islam di kawasan Asia Selatan dan Asia Tengah, yang menjadi wilayah dimana komunitas Muslim berpengaruh terhadap pola migrasi global, khususnya di wilayah Eropa, Amerika Serikat, dan Australia.

ISLAM DI ASIA SELATAN

Islam memiliki pengaruh besar di Asia Selatan. Wilayah ini terdiri dari negara-negara seperti India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, dan Nepal. Penyebaran Islam di Asia Selatan dimulai pada abad ke-7 Masehi, ketika para pedagang Arab pertama kali datang ke wilayah tersebut untuk berdagang. Penyebaran Islam di Asia Selatan dimulai pada abad ke-7 Masehi ketika para pedagang Arab dan Persia mulai melakukan perdagangan dengan wilayah tersebut. Selama masa ini, mereka membawa agama Islam bersama mereka dan menyebarkan agama ini ke wilayah tersebut.

Namun, penyebaran Islam di wilayah ini baru berlangsung secara masif pada abad ke-10 Masehi, ketika tentara Arab menaklukkan Sindh di Pakistan saat ini. Setelah itu, wilayah-wilayah lain di Asia Selatan mulai menerima pengaruh Islam. Pada abad ke-12, Sultan Muhammad Ghori menaklukkan wilayah-wilayah seperti Delhi dan Bengal, membawa Islam ke wilayah tersebut. Pada abad ke-16, kekuasaan Mughal mendominasi wilayah ini dan membawa Islam lebih dalam ke dalam masyarakat.

Selanjutnya, Kesultanan Delhi, Islam tidak hanya menjadi agama para penguasa, tetapi juga menyebar ke seluruh lapisan masyarakat melalui perdagangan dan misi dakwah. Penyebaran Islam di India juga dipengaruhi oleh kebijakan toleransi dan inklusivitas para penguasa Muslim, yang memungkinkan para pendatang Muslim dan non-Muslim hidup berdampingan dengan relatif damai.

Pada abad ke-16, Kekaisaran Mughal memperkuat penyebaran Islam di India melalui ekspansi dan pembangunan infrastruktur, seperti jaringan jalan dan jembatan, yang memudahkan perdagangan dan dakwah. Selama masa kekuasaan Mughal, Islam berkembang menjadi agama mayoritas di beberapa wilayah di India, seperti Punjab dan Bengal.

Namun, pada abad ke-18, penyebaran Islam di India mengalami kendala ketika Inggris mulai mengambil alih wilayah India melalui berbagai perjanjian dan peperangan. Meskipun Inggris secara resmi menganut kebijakan toleransi agama, namun sejumlah tindakan mereka, seperti pemindahan penduduk Hindu dari wilayah-wilayah Muslim dan penindasan terhadap pergerakan kemerdekaan Muslim, memicu ketegangan antara umat Islam dan Hindu di India.

Setelah kemerdekaan India pada tahun 1947, umat Islam di wilayah tersebut memisahkan diri dan membentuk negara Pakistan sebagai rumah bagi mayoritas Muslim. Namun, pemisahan tersebut juga memicu konflik yang berkepanjangan antara India dan Pakistan, terutama terkait wilayah Kashmir yang menjadi sengketa antara kedua negara.

Di samping konflik politik, Islam juga menjadi topik penting dalam politik India pasca-kemerdekaan, terutama terkait dengan gerakan kemerdekaan Kashmir dan perjuangan hak-hak minoritas Muslim di India. Pada era pascakemerdekaan, gerakan Islamis juga mulai muncul di India, seperti gerakan Jamaat-e-Islami yang dipimpin oleh Abul A'la Maududi.

Namun, gerakan Islamis di India tidak sepenuhnya berhasil mengumpulkan massa dan memengaruhi politik India secara signifikan. Terlepas dari itu, Islam tetap menjadi agama mayoritas di beberapa wilayah India, seperti Jammu dan Kashmir, dan memiliki pengaruh kuat dalam budaya dan kehidupan sehari-hari di India.

Di Pakistan, Islam menjadi agama resmi dan memainkan peran penting dalam politik negara tersebut. Setelah kemerdekaan, negara ini menjadi negara Islam pertama di dunia dan memandang dirinya sebagai pemimpin dunia Muslim. Namun, meskipun Islam menjadi agama mayoritas di Pakistan, tetapi masyarakat di negara tersebut terbagi menjadi beberapa kelompok, seperti Sunni, Syiah, Ahmadiyah, dan suku-suku etnis yang berbeda.

Di Bangladesh, Islam juga menjadi agama mayoritas dan memainkan peran penting dalam politik negara tersebut. Pada awal kemerdekaan Bangladesh dari Pakistan pada tahun 1971, gerakan Islamis juga muncul di negara tersebut, seperti Jamaat-e-Islami.

Di India, Islam telah memainkan peran penting dalam pembentukan kebudayaan dan identitas masyarakat Muslim. Masyarakat Muslim di India memiliki sejarah yang panjang dan kaya, dan memiliki banyak kebudayaan dan praktik unik yang terkait dengan agama mereka. Banyak festival Muslim seperti Idul Fitri dan Idul Adha dirayakan di seluruh India, dan banyak masjid dan makam penting yang menjadi tempat ziarah bagi umat Muslim.

Di Pakistan, Islam adalah agama resmi negara dan memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan sosial dan politik. Banyak kelompok Islamis telah memainkan peran penting dalam politik Pakistan, dengan banyak partai politik didasarkan pada platform Islam. Selain itu, banyak lembaga pendidikan dan keagamaan didirikan di Pakistan untuk menyebarkan ajaran Islam dan memperkuat identitas Muslim.

Di Bangladesh, mayoritas penduduk adalah Muslim, dan Islam memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan politik negara tersebut. Banyak kelompok Islamis aktif di Bangladesh, dan agama sering digunakan sebagai alat politik oleh beberapa partai politik.

Di Sri Lanka, mayoritas penduduk adalah Buddha, tetapi terdapat komunitas Muslim yang signifikan di negara tersebut. Masyarakat Muslim di Sri Lanka memiliki sejarah yang panjang dan kaya, dan telah memberikan banyak pengaruh pada kebudayaan dan identitas masyarakat.

Di Nepal, mayoritas penduduknya adalah Hindu, tetapi terdapat komunitas Muslim yang signifikan di negara tersebut.

Mencermati perkembangan tersebut, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyebaran Islam di Asia Selatan. Faktor pertama adalah perdagangan. Para pedagang Arab membawa agama Islam bersama mereka ketika mereka datang ke wilayah ini untuk berdagang, dan agama ini tersebar dengan cepat di antara komunitas perdagangan.

Faktor kedua adalah invasi. Para penguasa Muslim seperti Sultan Muhammad Ghorî menaklukkan wilayah-wilayah di Asia Selatan dan membawa Islam ke wilayah tersebut. Ini memungkinkan agama ini tersebar ke wilayah yang lebih luas dan memungkinkan pembentukan masyarakat Muslim yang besar.

Faktor ketiga adalah kekuasaan politik. Kekuasaan politik Mughal di India memungkinkan Islam untuk menjadi agama yang dominan di wilayah tersebut. Banyak pemimpin politik Mughal adalah Muslim, dan banyak lembaga keagamaan dan pendidikan didirikan untuk memperkuat agama Islam.

Faktor keempat adalah perdagangan budaya. Islam membawa kebudayaan dan praktik baru ke wilayah ini, dan beberapa praktik ini bercampur dengan budaya lokal. Misalnya, banyak tradisi Islam seperti

kebaktian di masjid dan puasa telah diadaptasi oleh masyarakat lokal di wilayah ini.

Seiring dengan perkembangan zaman, banyak isu yang muncul terkait dengan pengaruh Islam di Asia Selatan. Salah satu isu yang paling kontroversial adalah ekstremisme agama dan terorisme. Beberapa kelompok ekstremis di wilayah ini menggunakan agama sebagai alasan untuk melakukan tindakan kekerasan dan terorisme. Meskipun mayoritas umat Islam di wilayah ini menolak kekerasan dan terorisme, isu ini tetap menjadi perhatian utama bagi pemerintah dan masyarakat di Asia Selatan.

Di sisi lain, ada juga banyak upaya untuk memperkuat toleransi antar agama di wilayah ini. Banyak kelompok masyarakat sipil dan organisasi keagamaan yang bekerja sama untuk meningkatkan dialog antar agama dan mempromosikan kerukunan antar umat beragama. Pemerintah juga telah meluncurkan berbagai program untuk mempromosikan keharmonisan antar agama dan mendorong integrasi sosial di wilayah ini.

Dalam beberapa tahun terakhir, kita juga menyaksikan kemunculan gerakan Islam moderat di Asia Selatan. Gerakan ini bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai Islam yang moderat dan menentang ekstremisme agama. Kelompok-kelompok ini berusaha untuk mempromosikan Islam sebagai agama yang toleran dan inklusif, dan mendorong dialog antar agama sebagai cara untuk memperkuat kerukunan antar umat beragama di wilayah ini.

Dalam kesimpulannya, Islam telah memainkan peran penting dalam sejarah Asia Selatan. Agama ini tidak hanya mempengaruhi masyarakat dan budaya di wilayah ini, tetapi juga memainkan peran penting dalam politik dan ekonomi. Meskipun isu-isu seperti ekstremisme agama dan terorisme tetap menjadi perhatian utama, ada banyak upaya yang dilakukan untuk memperkuat toleransi antar agama dan mempromosikan nilai-nilai Islam

yang moderat. Dengan adanya gerakan Islam moderat yang semakin kuat di wilayah ini, Islam masih memiliki masa depan yang cerah di Asia Selatan.

ISLAM DALAM ASIA TENGAH

Asia Tengah merupakan wilayah yang memiliki sejarah panjang penyebaran Islam. Wilayah ini adalah tempat lahirnya peradaban besar seperti Timurid, Samanid, dan Khwarazmian. Selain itu, wilayah ini juga menjadi pusat peradaban Islam di masa lalu, yang membawa pengaruh besar pada kebudayaan, seni, dan arsitektur di wilayah tersebut.

Penyebaran Islam di Asia Tengah dimulai pada abad ke-7 Masehi, ketika kaum Muslim Arab melakukan ekspansi dan penaklukan di wilayah Timur Tengah dan Asia Tengah. Meskipun wilayah ini memiliki sejarah panjang penyebaran Islam, namun perkembangannya tidak selalu berjalan mulus, terutama pada masa-masa ketika wilayah ini diperintah oleh dinasti non-Muslim.

Selama Abad Pertengahan, Asia Tengah menjadi pusat peradaban Islam yang penting, terutama selama masa kekuasaan Timurid pada abad ke-15. Selama masa ini, seni, arsitektur, dan sastra berkembang pesat, dan menjadi ciri khas dari peradaban Islam di Asia Tengah. Selain itu, Timurid juga memperkenalkan sistem pendidikan yang canggih dan berhasil menciptakan beberapa sarjana terkemuka, seperti Ulugh Beg dan Ali Shir Nava'i.

Pada abad ke-18, Asia Tengah jatuh ke tangan dinasti Qing, yang memerintah wilayah tersebut selama hampir 200 tahun. Selama masa ini, penyebaran Islam terhambat, dan banyak masyarakat yang memeluk Islam secara rahasia karena takut akan penganiayaan. Namun, meskipun

penyebaran Islam terhambat, namun agama ini tetap bertahan dan berkembang di wilayah tersebut.

Pada abad ke-19, wilayah Asia Tengah menjadi objek persaingan antara Rusia dan Inggris, yang ingin memperluas pengaruhnya di wilayah tersebut. Pada akhirnya, Rusia berhasil mengambil alih wilayah Asia Tengah dan menjadikannya sebagai wilayah kekuasaannya. Meskipun Rusia secara resmi mengadopsi kebijakan toleransi agama, namun kebijakan ini tidak selalu diterapkan dengan baik, terutama terhadap komunitas Muslim di wilayah tersebut.

Pada era Soviet, agama dianggap sebagai ancaman bagi negara, dan pemerintah Soviet melakukan upaya untuk membasmi agama, termasuk Islam. Meskipun demikian, agama tetap bertahan dan berkembang secara rahasia, terutama di wilayah-wilayah pedesaan. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, penyebaran Islam di Asia Tengah kembali berkembang pesat.

Pada saat ini, Asia Tengah menjadi salah satu wilayah dengan pertumbuhan Muslim tercepat di dunia. Menurut laporan Pew Research Center, pada tahun 2015, populasi Muslim di wilayah ini mencapai sekitar 64 juta jiwa, atau sekitar 90% dari total populasi wilayah ini. Meskipun mayoritas Muslim di wilayah ini mengidentifikasi diri mereka sebagai Sunni, namun terdapat juga kelompok minoritas seperti Syiah, Sufi, dan Ahmadiyah.

Selain itu, terdapat juga beberapa gerakan Islamis di Asia Tengah, seperti Hizb ut-Tahrir dan Tablighi Jamaat, yang berupaya untuk mempromosikan Islam di wilayah ini. Selain itu, kelompok-kelompok Islamis juga mengkritik pemerintah yang mereka anggap tidak islami dan berupaya untuk menggulingkan pemerintahan yang ada.

Namun, perkembangan Islam di Asia Tengah tidak selalu positif, terutama terkait dengan masalah radikalisme dan terorisme. Wilayah ini pernah menjadi basis bagi kelompok teroris seperti Al-Qaeda dan Taliban. Selain itu, wilayah ini juga menjadi tempat tinggal bagi beberapa kelompok militan seperti ISIS.

Dalam upaya untuk mengatasi masalah radikalisme dan terorisme, pemerintah di wilayah ini telah memperkenalkan berbagai kebijakan dan program, seperti rehabilitasi bekas anggota kelompok militan, penghapusan bahasa radikalisme dari kurikulum pendidikan, dan peningkatan kerjasama internasional untuk mengatasi masalah tersebut.

Dalam kesimpulan, penyebaran Islam di Asia Tengah memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, dari masa kejayaan Timurid hingga penjajahan Rusia dan era Soviet. Meskipun agama ini pernah mengalami penindasan dan penganiayaan, namun Islam tetap bertahan dan berkembang pesat di wilayah ini, bahkan menjadi salah satu wilayah dengan pertumbuhan Muslim tercepat di dunia pada saat ini. Namun, perkembangan Islam di wilayah ini juga dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama terkait dengan masalah radikalisme dan terorisme, yang memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengatasinya. Silakan cermati daftar referensi berikut ini:

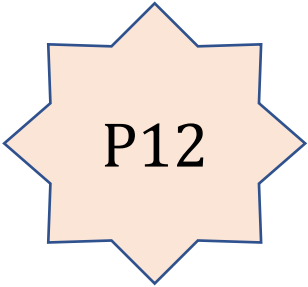
1. Ahmed, I. (2010). *Islamic Modernism in India and Pakistan, 1857-1964*. New York: Routledge.
2. Aslan, E. (2017). *The Islamic World: A Brief Introduction*. New York: Routledge.
3. Fuller, G. (2014). *The Future of Political Islam*. New York: Palgrave Macmillan.

4. Hussain, A. (2014). *The Politics of Religion in South and Southeast Asia*. New York: Routledge.
5. Jaffrelot, C. (2015). *The Pakistan Paradox: Instability and Resilience*. New York: Oxford University Press.
6. Malik, H. (2017). *Islam in South Asia: A Short History*. New York: Oxford University Press.
7. Riaz, A., & Rahman, A. (2017). *Militancy and Violence in South Asia: Trends and Threats*. New York: Routledge.
8. Sikand, Y. (2012). *Muslims in India Since 1947: Islamic Perspectives on Inter-Faith Relations*. New York: Routledge.
9. Zaman, M. (2018). *Modern Islamic Thought in South Asia*. New York: Routledge.
10. Daftar Referensi:
11. Ahmed, I. (2010). *Islamic Modernism in India and Pakistan, 1857-1964*. New York: Routledge.
12. Ali, T. (2017). *The Religious Divide in India*. *The Diplomat*. Diakses pada tanggal 20 Januari 2022, dari <https://thediplomat.com/2017/05/the-religious-divide-in-india/>.
13. Aslan, E. (2017). *The Islamic World: A Brief Introduction*. New York: Routledge.
14. Bhargava, R. (2015). *The Idea of India*. New York: Penguin Books India.
15. Fuller, G. (2014). *The Future of Political Islam*. New York: Palgrave Macmillan.
16. Hussain, A. (2014). *The Politics of Religion in South and Southeast Asia*. New York: Routledge.
17. Jaffrelot, C. (2015). *The Pakistan Paradox: Instability and Resilience*. New York: Oxford University Press.

18. Khan, M. A. (2018). Islam in South Asia: A Historical Overview. *The Diplomat*. Diakses pada tanggal 20 Januari 2022, dari <https://thediplomat.com/2018/08/islam-in-south-asia-a-historical-overview/>.
19. Malik, H. (2017). *Islam in South Asia: A Short History*. New York: Oxford University Press.
20. Riaz, A., & Rahman, A. (2017). *Militancy and Violence in South Asia: Trends and Threats*. New York: Routledge.
21. Sikand, Y. (2012). *Muslims in India Since 1947: Islamic Perspectives on Inter-Faith Relations*. New York: Routledge.
22. Zaman, M. (2018). *Modern Islamic Thought in South Asia*. New York: Routledge.
23. Esposito, J. L. (1999). *The Islamic Threat: Myth or Reality?*. Oxford University Press.
24. Gheissari, A., & Nasr, V. (Eds.). (2006). *Democracy in Iran: History and the Quest for Liberty*. Oxford University Press.
25. Ismailbekova, A. (2014). Islam and Politics in Central Asia. In *The Wiley Blackwell Companion to Political Geography* (pp. 429-442). Wiley Blackwell.
26. Khazanov, A. M. (2013). *After the USSR: Ethnicity, Nationalism and Politics in the Commonwealth of Independent States*. University of Wisconsin Press.
27. Knysh, A. (2010). *Islamic Mysticism: A Short History*. Brill.
28. Mura, A. (2017). *Women, Leadership and Mosques: Changes in Contemporary Islamic Authority*. Bloomsbury Publishing.
29. Rasanayagam, J. (2005). *Afghanistan: A Modern History*. I. B. Tauris.

30. Roy, O. (2018). *Jihad and Death: The Global Appeal of Islamic State*. Hurst Publishers.
31. Tapper, R. (1991). Islam in Central Asia. *The Journal of Asian Studies*, 50(1), 67-90.
32. Zanca, R. (2012). Islam and Politics in Kazakhstan. *Central Asian Survey*, 31(1), 107-122.

DINAMIKA POLITIK ISLAM DI EROPA



P12

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan memperoleh pemahaman dan menguasai tentang sejarah dinamika politik Islam di kawasan Eropa, sebagai pusat peradaban maju dunia.

ISLAM DI EROPA

Islam telah tumbuh dan berkembang di Eropa selama lebih dari 13 abad sejak awal penyebarannya dari Arab ke Spanyol pada abad ke-8. Meskipun Islam telah mengalami periode kejayaan di Eropa pada abad pertengahan, terutama di Spanyol dan wilayah-wilayah di sekitarnya, penyebaran Islam di Eropa modern telah dihadapkan dengan tantangan besar.

Penyebaran Islam di Eropa dimulai pada awal abad ke-8 ketika pasukan Muslim menaklukkan Spanyol dan Portugal di bawah kepemimpinan Tariq bin Ziyad. Selama periode kejayaan Islam di Spanyol, yang dikenal sebagai Andalusia, Islam berkembang pesat dan menjadi pusat kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan seni. Periode ini dikenal sebagai Zaman Kejayaan Islam di Eropa.

Namun, pada akhir abad ke-15, Raja Ferdinand dan Ratu Isabella dari Spanyol mengambil tindakan untuk mengusir Muslim dari Spanyol dan mengakhiri kekuasaan Islam di wilayah tersebut. Ini diikuti oleh pengusiran Muslim dari Portugal pada abad ke-16. Setelah itu, penyebaran Islam di

Eropa terutama terjadi melalui migrasi orang-orang Muslim ke negara-negara Eropa pada abad ke-20.

Penyebaran Islam di Eropa modern telah dihadapkan dengan berbagai tantangan, terutama karena adanya isu-isu keamanan, politik, dan sosial yang berkaitan dengan Islam. Sejak serangan 11 September 2001 di AS, terorisme Islam telah menjadi isu utama di seluruh dunia, termasuk di Eropa. Ada kekhawatiran bahwa orang-orang yang terhubung dengan organisasi teroris seperti Al Qaeda atau ISIS bisa menyusup ke dalam komunitas Muslim di Eropa dan melakukan serangan teroris.

Tantangan lain yang dihadapi oleh Islam di Eropa adalah kebijakan imigrasi yang ketat dan diskriminasi terhadap Muslim. Ada beberapa negara Eropa yang telah mengadopsi kebijakan yang sangat ketat terhadap imigran dan pengungsi, termasuk Muslim, yang ingin masuk ke negara mereka. Hal ini telah memicu perdebatan tentang masalah hak asasi manusia dan kebijakan imigrasi di seluruh Eropa.

Selain itu, ada juga diskriminasi terhadap Muslim yang tinggal di Eropa. Beberapa kelompok Muslim telah mengalami diskriminasi dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan akses ke layanan publik. Hal ini memperumit integrasi Muslim di Eropa dan menciptakan ketegangan antara masyarakat Muslim dan masyarakat umum. Namun, meskipun dihadapkan dengan tantangan yang serius, Islam terus tumbuh dan berkembang di Eropa.

Pada periode modern, Islam di Eropa mengalami tantangan lain yang berasal dari pergeseran demografis. Jumlah penduduk Muslim di Eropa meningkat drastis karena imigrasi, terutama dari negara-negara yang dulunya menjadi koloni Eropa seperti Maroko dan Turki. Hal ini memicu perdebatan tentang keseimbangan antara hak individu dan kebijakan integrasi sosial di negara-negara Eropa. Negara-negara seperti Prancis dan Belgia telah melarang pemakaian simbol-simbol Islam yang dianggap

merusak identitas nasional, seperti penggunaan burqa dan niqab oleh wanita Muslim.

Di sisi lain, beberapa kelompok Islam di Eropa mulai mengambil peran yang lebih aktif dalam politik dan masyarakat, seperti kelompok-kelompok Islamis yang berusaha menggulingkan pemerintahan sekuler dan membentuk negara Islam di Eropa. Kelompok-kelompok ini sering dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas sosial dan keamanan nasional di Eropa, dan menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan terjadinya terorisme.

Tantangan lain yang dihadapi oleh Islam di Eropa adalah meningkatnya Islamofobia, yaitu ketakutan, ketidaksukaan, atau diskriminasi terhadap Muslim dan agama Islam. Hal ini terutama dipicu oleh serangan teroris yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Islamis, serta berita-berita yang menyajikan Islam dan Muslim secara negatif di media massa. Islamofobia telah menyebabkan kekerasan fisik dan verbal terhadap Muslim di Eropa, serta mendorong munculnya partai politik yang menentang keberadaan Muslim di Eropa.

Namun, di tengah tantangan-tantangan tersebut, ada juga upaya untuk mempromosikan dialog antaragama dan membangun toleransi antarumat beragama di Eropa. Beberapa organisasi Muslim di Eropa bekerja sama dengan organisasi non-Muslim untuk memperkuat toleransi antaragama dan melawan Islamofobia. Selain itu, ada juga gerakan Islam yang lebih moderat yang mendorong integrasi sosial dan keseimbangan antara hak individu dan kebijakan negara.

Dalam konteks Eropa, Islam juga mengalami dinamika yang unik karena hadirnya banyak jenis Islam yang berasal dari berbagai negara. Ada Islam Sunni, Syiah, Sufi, dan Ahmadiyah. Ada pula Islam yang dianut oleh etnis Tatar dan Chechnya di Rusia, Islam yang dianut oleh orang Bosnia, Albania dan Kosovo di Balkan, Islam yang dianut oleh orang Turki dan Kurdi

di Turki, dan Islam yang dianut oleh orang Maroko dan Tunisia di Afrika Utara. Setiap jenis Islam ini memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri yang mempengaruhi cara pengamalan agama dan interaksi dengan masyarakat di negara-negara Eropa.

Tantangan besar lain yang dihadapi oleh Muslim di Eropa saat ini adalah isu radikalisme. Terdapat beberapa faktor yang berkontribusi pada radikalisme di kalangan Muslim Eropa, seperti ketidakpuasan ekonomi, diskriminasi, dan keterasingan sosial. Hal ini kemudian memunculkan kelompok-kelompok ekstremis yang menyerukan tindakan kekerasan dan terorisme sebagai bentuk perlawanan atas diskriminasi dan ketidakadilan yang dirasakan.

Namun, harus diingat bahwa kelompok ekstremis tersebut tidak mewakili seluruh umat Islam di Eropa. Mayoritas Muslim di Eropa adalah orang yang taat dan menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian, toleransi, dan keterbukaan. Oleh karena itu, tugas kita adalah untuk menanggulangi isu radikalisme dan mendukung integrasi Muslim ke dalam masyarakat Eropa secara lebih efektif.

Selain isu radikalisme, Muslim Eropa juga menghadapi tantangan dalam mempertahankan identitas dan nilai-nilai Islam di tengah tekanan budaya Barat yang kuat. Hal ini terutama dirasakan oleh generasi muda Muslim yang terkena dampak dari globalisasi dan modernisasi yang semakin meluas. Ada kekhawatiran bahwa identitas Muslim akan tergerus oleh budaya Barat dan menyebabkan hilangnya keberagaman dalam masyarakat Eropa.

Oleh karena itu, penting bagi Muslim Eropa untuk menjaga identitas dan nilai-nilai Islam, sambil tetap membuka diri terhadap nilai-nilai yang positif dari budaya Barat. Integrasi dan partisipasi yang aktif dalam

masyarakat Eropa juga dapat membantu Muslim untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan mereka dengan lebih efektif.

Dengan demikian, penyebaran Islam di Eropa memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, mulai dari masa kekuasaan Utsmaniyah hingga migrasi modern yang membawa Muslim ke Eropa Barat. Meskipun Islam menghadapi berbagai tantangan dalam menetapkan akar di Eropa, agama ini telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan budaya dan peradaban Eropa.

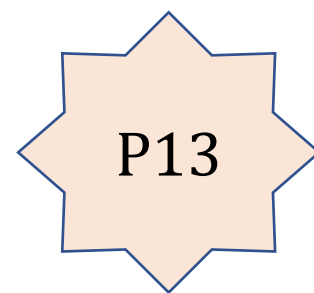
Selain itu, keberadaan kelompok-kelompok Islam yang radikal dan ekstremis di Eropa juga menjadi tantangan serius bagi integrasi dan keamanan di kawasan tersebut. Beberapa kelompok seperti Al Qaeda dan ISIS berhasil merekrut sejumlah warga Eropa untuk bergabung dengan mereka, bahkan melakukan serangan teror di beberapa negara Eropa.

Meskipun begitu, keberadaan umat Islam di Eropa tidak dapat dipandang sebelah mata dan harus diakui sebagai bagian penting dari keragaman budaya dan keberagaman yang ada di benua itu. Banyak Muslim di Eropa yang telah berhasil berkontribusi positif di berbagai bidang seperti seni, sains, dan politik. Untuk pemahaman yang lebih lengkap, silakan baca materi berikut ini:

1. Azra, Azyumardi. (2006). Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad XVII dan XVIII. Mizan.
2. Esposito, John L. (2002). Islam: The Straight Path (3rd ed.). Oxford University Press.
3. Hefner, Robert W. (2011). Shari'a Politics: Islamic Law and Society in the Modern World. Indiana University Press.
4. Hunter, Shireen. (2002). Islam in Russia: The Politics of Identity and Security. M.E. Sharpe.

5. Roy, Olivier. (2004). *Globalized Islam: The Search for a New Ummah*. Columbia University Press.
6. Shankland, David. (2011). *The Politics of Islamic Revivalism: Diversity and Unity*. Edinburgh University Press.
7. Triandafyllidou, Anna & Modood, Tariq. (2010). *Muslims in 21st Century Europe: Structural and Cultural Perspectives*. Routledge.

DINAMIKA PERKEMBANGAN POLITIK ISLAM DI AUSTRALIA



CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan memperoleh pemahaman dan menguasai tentang sejarah dinamika politik Islam di Kawasan Australia, sebagai peradaban Barat yang terjebak di tengah-tengah peradaban Asia dan menjadi perwakilan dari kekuatan Eropa dan Amerika Serikat di Kawasan Indo-Pasifik saat ini.

ISLAM DI AUSTRALIA

Keberadaan Muslim di Australia dapat dilacak sejak abad ke-17, ketika sejumlah Muslim tiba di Australia sebagai pelaut dan pedagang. Pada abad ke-18, para pedagang Muslim tiba di Australia untuk berdagang dengan orang Eropa, terutama untuk mendapatkan barang dagangan dari Eropa. Para pedagang Muslim ini dikenal sebagai "Laskar Muslim" dan berasal dari berbagai negara, termasuk India, Pakistan, dan Indonesia.

Namun, keberadaan Muslim di Australia baru menjadi signifikan pada abad ke-19, ketika beberapa Muslim tiba di Australia sebagai bagian dari penjajahan Inggris di Asia Selatan dan Timur Tengah. Banyak dari mereka adalah pekerja kontrak, seperti sopir kereta api dan buruh pelabuhan, yang dipekerjakan oleh pemerintah Inggris. Selain itu, banyak juga Muslim yang tiba di Australia sebagai imigran, terutama dari Lebanon dan Turki, pada awal abad ke-20.

Pada awal tahun 1900-an, terdapat sekitar 800 Muslim di Australia. Pada tahun 1947, jumlah Muslim di Australia meningkat menjadi 5.000 orang, dengan mayoritas berasal dari Lebanon dan Turki. Pada tahun 1971, jumlah Muslim di Australia meningkat menjadi 32.000 orang, dengan mayoritas berasal dari Asia Selatan, Timur Tengah, dan Indonesia. Saat ini, terdapat sekitar 600.000 Muslim di Australia, atau sekitar 2,6% dari populasi total Australia.

Keberadaan Muslim di Australia tidak selalu diterima dengan baik oleh masyarakat Australia. Sejak terjadinya serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat, masyarakat Australia semakin cenderung memandang Muslim dengan curiga dan mencurigai setiap tindakan Muslim sebagai tindakan teroris. Akibatnya, terdapat peningkatan diskriminasi terhadap Muslim di Australia, seperti penghinaan dan penyerangan terhadap masjid dan sekolah Muslim.

Peningkatan diskriminasi terhadap Muslim di Australia juga disebabkan oleh peningkatan imigrasi Muslim ke Australia. Meskipun Australia memiliki sistem imigrasi yang ketat, terdapat peningkatan jumlah imigran Muslim ke Australia, terutama dari Indonesia dan Timur Tengah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat Australia.

Seiring dengan terus bertumbuhnya populasi Muslim di Australia, muncul juga tantangan dalam mempertahankan identitas dan praktek keagamaan mereka. Salah satu tantangan yang sering muncul adalah masalah stigmatisasi dan diskriminasi. Sejak serangan 11 September di Amerika Serikat pada tahun 2001, dan serangan teroris terkait Islam yang terjadi di seluruh dunia, sering terjadi peningkatan stigmatisasi terhadap umat Islam, termasuk di Australia. Banyak Muslim Australia merasa diisolasi dan dipandang dengan curiga oleh masyarakat umum.

Di samping itu, muncul juga perdebatan tentang bagaimana Islam dapat mengakomodasi dan bersatu dengan nilai-nilai dan budaya Australia yang sudah ada. Beberapa kelompok konservatif di Australia telah mengecam Islam sebagai agama yang tidak kompatibel dengan nilai-nilai Australia dan sebagai ancaman terhadap identitas Australia. Pada tahun 2005, Perdana Menteri Australia saat itu, John Howard, memicu kontroversi ketika ia menyatakan bahwa nilai-nilai yang dipegang oleh Muslim Australia tidak selalu konsisten dengan nilai-nilai Australia.

Namun, meskipun menghadapi tantangan ini, komunitas Muslim Australia terus berupaya untuk mempertahankan identitas dan praktek keagamaan mereka. Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah membangun masjid yang lebih besar dan lebih representatif, seperti Masjid Lakemba di Sydney dan Masjid Fawkner di Melbourne. Selain itu, juga ada upaya untuk mempromosikan pemahaman dan toleransi antaragama melalui dialog antarumat beragama dan program-program pendidikan.

Di samping itu, sejumlah tokoh Muslim Australia telah menunjukkan kesuksesan mereka di berbagai bidang, termasuk dalam bidang politik, seni, olahraga, dan bisnis. Sebagai contoh, Waleed Aly, seorang wartawan dan pengamat politik, telah menjadi salah satu suara yang paling vokal dan terkemuka dalam mewakili perspektif Muslim Australia di media mainstream. Saat ini, ia menjadi pembawa acara program berita utama di salah satu stasiun televisi terbesar di Australia.

Sejarah penyebaran Islam di Australia dimulai pada abad ke-19, ketika para imigran dari berbagai belahan dunia mulai datang ke Australia dan membawa agama mereka. Meskipun jumlah Muslim Australia masih relatif kecil dibandingkan dengan jumlah umat Muslim di negara-negara lain, populasi Muslim Australia terus tumbuh dan menjadi semakin beragam dalam hal latar belakang etnis dan budaya.

Seiring dengan pertumbuhan populasi Muslim Australia, muncul juga tantangan dalam mempertahankan identitas dan praktek keagamaan mereka, seperti stigmatisasi dan diskriminasi, serta perdebatan tentang bagaimana Islam dapat mengakomodasi dan bersatu dengan nilai-nilai dan budaya Australia yang sudah ada. Meskipun menghadapi tantangan ini, komunitas Muslim Australia terus berupaya untuk mempertahankan identitas dan praktek keagamaan mereka, melalui berbagai inisiatif seperti membangun masjid yang lebih besar.

Seiring dengan bertambahnya umat Muslim di Australia, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam upaya mempertahankan identitas Muslim dan keberlangsungan agama Islam di Australia. Beberapa tantangan tersebut antara lain:

1. Stigma negatif terhadap Islam dan Muslim

Seperti di negara-negara Barat lainnya, di Australia pun terdapat stigma negatif terhadap Islam dan Muslim. Beberapa insiden terorisme yang melibatkan pelaku Muslim telah memberikan citra buruk bagi umat Muslim di Australia. Hal ini telah menyebabkan banyak orang yang menganggap bahwa Islam merupakan agama yang radikal dan berbahaya. Stigma negatif ini dapat menghambat upaya penyebaran Islam dan juga membuat umat Muslim di Australia merasa terisolasi dan tidak diterima oleh masyarakat sekitar.

2. Kurangnya dukungan dari pemerintah

Pemerintah Australia cenderung kurang memberikan dukungan kepada komunitas Muslim di Australia. Terkadang, kebijakan pemerintah dapat merugikan umat Muslim, seperti kebijakan imigrasi yang ketat dan sering kali mengarah pada diskriminasi terhadap Muslim. Selain itu, beberapa kebijakan publik seperti pengawasan terhadap penggunaan hijab

juga telah memicu kontroversi dan ketidakpuasan di kalangan komunitas Muslim.

3. Tantangan dalam menjaga identitas Muslim

Di Australia, umat Muslim menghadapi tantangan dalam menjaga identitas Muslim mereka. Mereka hidup di tengah masyarakat yang berbeda dan harus menemukan cara untuk mempertahankan identitas mereka sebagai Muslim. Beberapa tantangan dalam hal ini termasuk ketersediaan fasilitas ibadah yang terbatas, kurangnya guru agama Islam yang berkualitas, dan kebutuhan untuk memadukan nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai Barat yang lebih umum diadopsi oleh masyarakat Australia.

Meskipun menghadapi banyak tantangan, umat Muslim di Australia telah berhasil membangun masyarakat yang kuat dan berkembang. Mereka telah memperkenalkan budaya Islam ke dalam masyarakat Australia dan juga menyediakan banyak fasilitas yang dibutuhkan untuk mempertahankan praktik keagamaan mereka. Dalam upaya mempertahankan keberlangsungan Islam di Australia, dibutuhkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat Australia secara keseluruhan. Selain itu, komunitas Muslim di Australia juga harus terus beradaptasi dengan tantangan yang ada dan bekerja sama untuk mempertahankan identitas mereka sebagai Muslim di tengah masyarakat yang semakin majemuk.

Selain itu, juga terdapat kekhawatiran dari sebagian masyarakat non-Muslim terkait peran Islam dalam kehidupan publik di Australia. Beberapa organisasi anti-Islam seperti Reclaim Australia dan One Nation Party, yang didirikan oleh Pauline Hanson, telah memicu kontroversi terkait masalah ini dengan mendukung kampanye anti-imigrasi dan anti-Islam di Australia. Namun, sebagian besar masyarakat Australia menolak pandangan ini dan terus berusaha memperkuat kerukunan antarumat beragama.

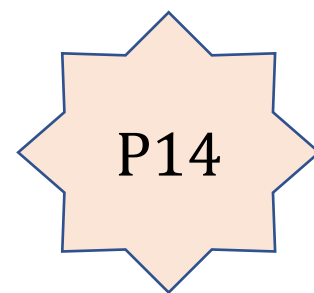
Dalam mengatasi tantangan ini, masyarakat Muslim Australia telah melakukan berbagai upaya untuk mengintegrasikan diri ke dalam masyarakat dan menjadi bagian dari Australia yang majemuk. Mereka terus memperkuat hubungan dengan komunitas non-Muslim dan mendorong dialog antarumat beragama. Selain itu, organisasi Islam di Australia juga telah mengambil inisiatif dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, seperti melalui program-program amal dan kegiatan sosial.

Secara keseluruhan, sejarah penyebaran Islam di Australia menunjukkan bahwa Islam telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat multikultural Australia. Meskipun terdapat tantangan dan kontroversi terkait peran Islam dalam masyarakat, masyarakat Muslim Australia terus berusaha untuk mengintegrasikan diri dan memperkuat hubungan dengan komunitas non-Muslim. Melalui dialog dan kerjasama antarumat beragama, diharapkan keberagaman dan kerukunan antarumat beragama di Australia dapat terus dipertahankan dan diperkuat. Selanjutnya, silakan cermati bacaan berikut ini:

1. Abdullah Saeed and Shahram Akbarzadeh (eds.), *Muslim Communities in Australia*, Sydney University Press, 2001.
2. Anna Halafoff and Kim Lam, "Islam in Australia", in *Palgrave Handbook of Islam in the West*, edited by Roberto Tottoli, Jorgen S. Nielsen, and Elisabetta Ruspini, Palgrave Macmillan, 2015.
3. Gary Bouma, "Islam in Australian Society: The Challenge of Diversity", *Australian Religion Studies Review*, Vol. 20, No. 1 (2007), pp. 1-20.
4. James Jupp, *From White Australia to Woomera: The Story of Australian Immigration*, Cambridge University Press, 2007.
5. The Australian Bureau of Statistics, "Census of Population and Housing: Reflecting Australia - Stories from the Census, 2016", 2017.

6. Fealy, G., & Ricci, R. (2015). Muslims in Australia. In *The Oxford Handbook of Islam and Politics* (pp. 653-670). Oxford University Press.
7. Smith, B. J. (2014). The Study of Islam in Australia: Challenges and Opportunities. *ISIM Review*, 25(1), 37-38.
8. Yilmaz, I. (2017). Muslim communities in Australia. In *Muslim Communities in Europe* (pp. 257-278). Springer.

DINAMIKA POLITIK ISLAM DI AMERIKA SERIKAT



CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan memperoleh pemahaman dan menguasai tentang sejarah dinamika politik Islam di Amerika Serikat Australia, sebagai pusat peradaban Barat pasca Perang Dunia II.

ISLAM DI AMERIKA SERIKAT

Islam di Amerika Serikat memiliki sejarah yang panjang dan beragam, dari para budak Afrika yang dibawa ke wilayah AS pada abad ke-17 hingga kedatangan para imigran muslim pada abad ke-20. Meskipun Islam adalah salah satu agama terbesar di dunia, namun di AS, umat Islam hanya merupakan minoritas yang kecil di antara populasi yang heterogen dan beragam. Namun, walaupun jumlahnya kecil, muslim di AS terus mengalami perkembangan dan tumbuh menjadi bagian yang semakin signifikan dari keberagaman budaya dan agama di AS.

Sejarah awal Islam di AS dimulai pada abad ke-17, ketika para budak Afrika yang dibawa ke wilayah AS adalah muslim. Namun, pengaruh Islam di AS tidak terlalu besar pada saat itu. Baru pada abad ke-20, imigran muslim dari berbagai negara mulai datang ke AS, membawa agama mereka dan membangun masjid serta organisasi muslim di wilayah tersebut. Sejak saat itu, keberadaan muslim di AS mulai meningkat dan semakin terlihat.

Salah satu faktor utama yang mempercepat penyebaran Islam di AS adalah program pertukaran budaya antara AS dan negara-negara muslim di dunia, yang dilakukan oleh Departemen Luar Negeri AS. Program ini membuka jalan bagi ribuan pelajar dan profesional muslim untuk belajar di AS, dan sekaligus membuka kesempatan bagi muslim AS untuk mempelajari dan memahami budaya dan agama mereka sendiri.

Namun, seperti halnya di negara-negara Barat lainnya, muslim di AS juga menghadapi banyak tantangan dalam mempertahankan keyakinan mereka di tengah masyarakat yang mayoritas beragama Kristen. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh muslim di AS adalah Islamophobia, yaitu ketakutan dan ketidaksenangan terhadap Islam dan umat muslim. Islamophobia dipicu oleh berbagai faktor, seperti serangan terorisme oleh kelompok-kelompok yang mengaku sebagai muslim, serta pandangan stereotip yang salah tentang Islam dan muslim.

Untuk mengatasi tantangan ini, muslim di AS terus berupaya untuk memperkuat identitas dan komunitas mereka. Mereka juga bekerja sama dengan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan mereka. Selain itu, terdapat organisasi-organisasi seperti Islamic Society of North America (ISNA) yang berperan dalam memajukan pendidikan dan pemahaman tentang Islam di AS.

Pada akhirnya, perkembangan dan penyebaran Islam di AS masih menghadapi banyak tantangan. Namun, dengan semakin meningkatnya kesadaran tentang Islam dan keberagaman agama di AS, serta semakin terbukanya masyarakat terhadap perbedaan, diharapkan keberadaan muslim di AS dapat semakin diterima dan dihargai sebagai bagian dari keragaman masyarakat dan budaya Amerika.

Selain itu, adanya peristiwa 11 September 2001 di Amerika Serikat juga memunculkan isu terorisme yang dihubungkan dengan Islam. Walaupun sebenarnya terorisme tidak memiliki hubungan dengan agama Islam secara langsung, namun banyak orang yang menyalahkan Islam sebagai agama yang membenarkan tindakan kekerasan dan terorisme. Hal ini tentu saja membuat sebagian umat Islam merasa dikecam dan tidak aman di Amerika Serikat.

Tantangan lainnya adalah perbedaan budaya dan gaya hidup yang berbeda antara masyarakat Amerika Serikat dan umat Islam. Dalam beberapa kasus, budaya dan gaya hidup Islam bisa menjadi suatu hal yang sulit untuk diterima di masyarakat Amerika Serikat yang mayoritas beragama Kristen dan memiliki budaya yang berbeda. Misalnya, masalah hijab atau pakaian yang menutup aurat bagi perempuan Muslim yang sering dianggap sebagai suatu hal yang aneh di Amerika Serikat.

Namun, seiring dengan waktu, terdapat juga banyak upaya yang dilakukan oleh para pemuka agama dan komunitas Muslim di Amerika Serikat untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Salah satu upaya tersebut adalah dengan membuka lembaga-lembaga pendidikan Islam dan mengembangkan lembaga-lembaga sosial untuk membantu masyarakat setempat.

Serangan 11 September 2001 memperburuk diskriminasi dan stigmatisasi, di mana banyak Muslim Amerika dianggap sebagai teroris potensial atau mendukung terorisme. Pada saat yang sama, beberapa kelompok ekstremis Muslim juga menjadi aktif di Amerika Serikat dan melakukan serangan teroris.

Namun, komunitas Muslim di Amerika Serikat juga telah berhasil mengatasi beberapa tantangan ini. Mereka telah bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya untuk memperbaiki hubungan

antaragama dan mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang Islam. Mereka juga telah aktif dalam membangun dialog antarbudaya dan antaragama melalui program-program seperti Konferensi Muslim-Amerika, Konvensi Islam-Amerika Utara, dan Konferensi Muslim-Amerika Selatan.

Selain itu, komunitas Muslim di Amerika Serikat juga telah memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk memperkuat komunikasi dan membangun kesadaran tentang isu-isu penting bagi mereka. Mereka juga telah mengambil inisiatif untuk mendirikan pusat-pusat kebudayaan dan masjid untuk mempromosikan kegiatan keagamaan, sosial, dan budaya yang positif.

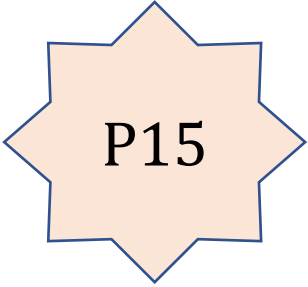
Namun, tantangan terbesar yang masih dihadapi oleh komunitas Muslim di Amerika Serikat adalah meningkatnya tingkat intoleransi dan diskriminasi yang dipicu oleh beberapa kelompok ekstremis dan politikus yang memanfaatkan isu-isu keamanan nasional untuk memperkuat agenda politik mereka. Oleh karena itu, penting bagi komunitas Muslim dan pemerintah untuk terus bekerja sama dan memperkuat dialog dan pemahaman antaragama dan budaya, serta melawan intoleransi dan diskriminasi yang semakin meningkat. Selanjutnya, baca referensi berikut:

1. Al-Mughni, H. (2019). The Muslim American Experience in the Trump Era: A Critical Discourse Analysis of the American Media Coverage. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 39(1), 45-60.
2. Bukhari, S. K. (2018). The American Muslim Experience: Negotiating Identities and Social Structures. In *The Oxford Handbook of American Islam* (pp. 213-226). Oxford University Press.
3. Pew Research Center. (2017). Muslims and Islam: Key findings in the US and around the world. Retrieved from

<https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/08/09/muslims-and-islam-key-findings-in-the-u-s-and-around-the-world/>

4. Ramadan, T. (2017). The future of Muslim communities in the West: Challenges and opportunities. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 37(1), 1-11.
5. Siddiqui, A. (2019). Building Strong Muslim-American Communities: A Sociological Perspective. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 39(1), 7-23.
6. Ali, K. (2017). *Muslim America: A Brief History*. Oxford University Press.
7. Brown, R. (2018). *Islam in America: A Brief History*. Oxford Research Encyclopedia of Religion.

TANTANGAN & MASA DEPAN POLITIK ISLAM DALAM DIPLOMASI & POLITIK INTERNASIONAL



P15

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa diharapkan bisa memahami dan bisa menganalisa pentingnya isu-isu Islam dan tantangannya dalam diplomasi dan politik internasional kontemporer

ISLAM DAN TANTANGAN MASA DEPAN DIPLOMASI INTERNASIONAL

Dalam konteks globalisasi yang semakin pesat, hubungan internasional antara negara-negara di dunia semakin penting. Diplomasi internasional menjadi salah satu instrumen utama dalam menjaga hubungan antar negara. Di era modern ini, tantangan yang dihadapi oleh diplomasi internasional semakin kompleks dan beragam, mulai dari masalah perdagangan, hak asasi manusia, hingga masalah keamanan dan terorisme. Di tengah situasi yang semakin kompleks ini, agama juga menjadi faktor yang semakin mempengaruhi diplomasi internasional. Islam sebagai agama yang paling banyak dianut di dunia memiliki peran yang sangat penting dalam hubungan internasional saat ini.

Islam adalah agama yang memiliki sejarah panjang dan mendalam dalam hubungan internasional. Sejarah panjang penyebaran Islam ke berbagai belahan dunia telah membuktikan kemampuan Islam dalam

memperkuat hubungan internasional antara bangsa-bangsa di dunia. Dalam konteks diplomasi internasional modern, Islam juga menjadi faktor yang semakin penting. Dalam artikel ini, kita akan membahas tentang peran Islam dalam diplomasi internasional saat ini, serta tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam menghadapi masa depan diplomasi internasional.

Sejak awal sejarahnya, Islam telah menjadi faktor penting dalam hubungan internasional. Setelah penaklukan kota Makkah pada tahun 630 Masehi, Islam menyebar dengan cepat ke berbagai belahan dunia, termasuk ke wilayah-wilayah yang jauh dari kawasan Timur Tengah seperti Asia Tenggara, India, China, Afrika, dan Eropa. Peran Islam dalam diplomasi internasional di masa lalu sangatlah besar. Sebagai contoh, perdagangan yang dilakukan oleh pedagang-pedagang Islam membawa kemajuan dan kesejahteraan ke berbagai belahan dunia, serta memperkuat hubungan internasional antara negara-negara di dunia. Selain itu, Islam juga menginspirasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai belahan dunia.

Dalam konteks diplomasi internasional modern, peran Islam juga menjadi faktor yang semakin penting. Sejak kejadian serangan teroris di New York pada tanggal 11 September 2001, Islam dan dunia Muslim semakin menjadi sorotan dunia internasional.

Peran Islam dalam diplomasi internasional modern semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan untuk mencapai perdamaian dunia yang lebih baik. Islam, sebagai agama yang mengajarkan perdamaian dan toleransi, telah menjadi elemen penting dalam upaya diplomasi internasional modern.

Sejarah mencatat bahwa Islam telah memainkan peran penting dalam sejarah diplomasi internasional. Dalam abad ke-7, ketika Islam muncul sebagai agama yang baru, kaum Muslimin terus memperluas wilayahnya

melalui jalur perdagangan dan penaklukan wilayah baru. Selama periode ini, kaum Muslimin membangun hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga mereka dan menjalin hubungan perdagangan yang kuat.

Pada masa kejayaan Khilafah Islam, pemerintah Muslim menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara di seluruh dunia, dari Afrika Utara hingga India. Khilafah juga berperan penting dalam perdagangan internasional, dengan kegiatan perdagangan yang melintasi Asia, Afrika, dan Eropa. Para pedagang Muslim membawa barang dagangan mereka ke seluruh dunia dan memperkenalkan kebudayaan Islam kepada banyak negara yang mereka kunjungi.

Namun, setelah berakhirnya masa kejayaan Khilafah, peran Islam dalam diplomasi internasional mengalami penurunan yang signifikan. Selama berabad-abad, banyak negara Muslim mengalami penjajahan oleh kekuatan asing, dan Islam tidak lagi dianggap sebagai kekuatan utama dalam diplomasi internasional.

Namun, pada abad ke-20, Islam kembali memainkan peran penting dalam diplomasi internasional. Pada tahun 1923, didirikan Liga Arab, sebuah organisasi yang bertujuan untuk memajukan kerja sama dan persahabatan antara negara-negara Arab. Liga Arab kemudian menjadi model bagi pembentukan organisasi-organisasi regional lainnya di seluruh dunia.

Selain Liga Arab, OIC (Organisasi Konferensi Islam) juga merupakan organisasi yang penting dalam diplomasi internasional modern. Didirikan pada tahun 1969, OIC bertujuan untuk memajukan kerja sama di antara negara-negara Muslim dan mempromosikan kerja sama ekonomi, politik, dan sosial antara anggota-anggotanya.

Selain itu, banyak negara Muslim yang memainkan peran penting dalam diplomasi internasional modern, seperti Mesir dan Arab Saudi. Mesir,

yang menjadi pemimpin dunia Arab pada tahun 1950-an dan 1960-an, terkenal karena perannya dalam mendukung gerakan kemerdekaan Afrika dan Asia. Arab Saudi, sebagai pemimpin dunia Islam, telah memainkan peran penting dalam upaya untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah dan mendukung upaya-upaya perdamaian di seluruh dunia.

Namun, meskipun Islam telah memainkan peran penting dalam diplomasi internasional modern, ada juga tantangan dan masalah yang dihadapi oleh negara-negara Muslim dalam upaya mereka untuk menjadi pemain yang lebih besar dalam arena internasional.

Selain itu, sejak 1970-an, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) juga menjadi aktor penting dalam diplomasi internasional. OKI merupakan organisasi antar-pemerintah yang didirikan pada tahun 1969 oleh negara-negara Muslim di bawah naungan PBB. OKI memiliki tujuan untuk mempromosikan kerja sama politik, ekonomi, dan sosial antara negara-negara anggota serta memperkuat solidaritas umat Islam secara global.

Seiring dengan perkembangan zaman, tantangan yang dihadapi oleh diplomasi Islam semakin kompleks. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah berkaitan dengan isu terorisme dan ekstremisme. Beberapa aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal Islam seperti Al-Qaida dan ISIS telah menimbulkan dampak negatif pada citra Islam di dunia internasional. Hal ini menuntut upaya bersama dari negara-negara Islam dan komunitas internasional untuk memerangi terorisme dan ekstremisme dengan cara-cara yang tidak merugikan umat Islam secara umum.

Selain itu, diplomasi Islam juga perlu menghadapi tantangan dalam mengatasi ketegangan antara negara-negara Muslim dan Barat, terutama dalam konteks hubungan antara Timur Tengah dan Amerika Serikat. Konflik yang terjadi di kawasan tersebut telah memicu ketegangan dan perpecahan antara negara-negara Islam dan Barat. Oleh karena itu, diperlukan upaya

diplomasi yang lebih aktif dan efektif untuk mengatasi ketegangan tersebut, dan mengembangkan kerja sama yang saling menguntungkan antara negara-negara Islam dan Barat.

Dalam menghadapi tantangan ini, diplomasi Islam dapat berperan sebagai jembatan antara negara-negara Muslim dan Barat. Diplomasi Islam dapat mempromosikan dialog antaragama dan antarbudaya, dan mengembangkan kerja sama dalam bidang ekonomi, sosial, dan keamanan. Hal ini dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kerja sama antara negara-negara Islam dan Barat, serta mendorong perdamaian dan stabilitas global.

Selain itu, diplomasi Islam juga dapat memainkan peran penting dalam mengatasi isu-isu global yang mempengaruhi umat Islam, seperti isu Palestina, Rohingya, dan krisis kemanusiaan di Suriah. Diplomasi Islam dapat mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut, dan bekerja sama dengan komunitas internasional untuk menyelesaikan konflik dan krisis tersebut.

Dalam menghadapi tantangan masa depan, diplomasi Islam perlu mengembangkan strategi yang lebih efektif dan inklusif. Diplomasi Islam perlu memperkuat kerja sama dengan negara-negara non-Muslim, termasuk Barat, untuk mengatasi isu-isu global yang mempengaruhi umat Islam. Diplomasi Islam juga perlu lebih aktif dalam mempromosikan dialog antaragama dan antarbudaya, dan mengembangkan kerja sama dalam bidang ekonomi, sosial, dan keamanan.

Dalam hal ini, Amerika Serikat berperan penting dalam diplomasi internasional modern. Amerika Serikat sering dianggap sebagai pemimpin dunia dalam mempromosikan hak asasi manusia, keadilan, perdamaian, dan demokrasi. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi peran Islam dalam

diplomasi Amerika Serikat dan apakah Islam dapat memainkan peran yang lebih besar di masa depan dalam upaya untuk mencapai tujuan-tujuan ini.

Seiring dengan meningkatnya jumlah Muslim di seluruh dunia, termasuk di Amerika Serikat, diplomasi Muslim semakin penting dalam hubungan internasional. Diplomasi Muslim dapat diartikan sebagai upaya pemimpin Muslim dalam mengembangkan hubungan internasional antar negara atau antar komunitas dengan tujuan memperjuangkan kepentingan Muslim secara global. Hal ini dilakukan dengan mempromosikan perdamaian, mengurangi ketidakadilan, dan meningkatkan toleransi di antara agama-agama.

Salah satu contoh penting dari diplomasi Muslim di Amerika Serikat adalah keterlibatan negara-negara Muslim dalam upaya mencapai perdamaian di Timur Tengah. Pada tahun 1993, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Israel menandatangani Perjanjian Oslo yang berupaya mengakhiri konflik antara kedua belah pihak. Meskipun upaya perdamaian ini akhirnya gagal, diplomasi Muslim terus berjuang untuk mencapai perdamaian di Timur Tengah.

Selain itu, peran organisasi-organisasi Muslim di Amerika Serikat semakin penting dalam diplomasi internasional modern. Council on American-Islamic Relations (CAIR) adalah organisasi terkemuka di Amerika Serikat yang berupaya mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang Islam dan meningkatkan hubungan antara Muslim dan non-Muslim. CAIR telah berperan dalam membantu upaya diplomasi antara Amerika Serikat dan negara-negara Muslim di seluruh dunia.

Namun, tantangan juga hadir dalam upaya memperkuat diplomasi Muslim di Amerika Serikat. Sejumlah masalah politik dan sosial di beberapa negara Muslim, termasuk konflik dan kekerasan, dapat menghalangi kemajuan dalam upaya diplomasi Muslim. Selain itu, ada juga

ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam hubungan antara negara-negara Muslim dan negara-negara non-Muslim.

Dalam konteks ini, Islam dapat memainkan peran yang lebih besar dalam diplomasi internasional di masa depan dengan lebih memperkuat pemahaman antar budaya dan agama. Penting untuk menciptakan lingkungan yang saling menghargai di mana semua agama diakui dan dihormati. Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui dialog antaragama yang lebih terbuka dan melibatkan masyarakat sipil dari berbagai agama.

Islam juga memiliki peran penting dalam keamanan global, terutama dalam hal pencegahan terorisme dan ekstremisme. Islam yang moderat dan toleran memiliki potensi besar untuk memerangi kekerasan dan terorisme dengan mengajarkan nilai-nilai perdamaian dan toleransi. Organisasi Islam seperti Organisasi Kerjasama Islam (OKI) telah memainkan peran penting dalam upaya untuk mencegah dan mengurangi kekerasan dan terorisme di seluruh dunia.

Sebagai contoh, pada tahun 2015, OKI mengecam serangan teroris di Paris dan menyatakan bahwa "terorisme tidak memiliki agama, kepercayaan, atau budaya." OKI juga telah mengambil langkah-langkah untuk mengembangkan rencana aksi global untuk memerangi terorisme dan kekerasan yang didasarkan pada agama atau keyakinan.

Selain itu, banyak negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki hubungan diplomatik yang kuat dengan negara-negara Barat. Hubungan ini membawa manfaat besar bagi kedua belah pihak, termasuk dalam hal perdagangan, keamanan, dan stabilitas regional dan global. Sebagai contoh, negara-negara Muslim seperti Turki, Qatar, dan Uni Emirat Arab memainkan peran penting dalam diplomasi regional dan global,

mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara.

Namun, tantangan tetap ada dalam upaya untuk mengurangi kekerasan dan terorisme yang didasarkan pada agama. Ada kelompok-kelompok ekstremis yang menggunakan agama untuk membenarkan tindakan kekerasan dan terorisme mereka, dan ini menimbulkan ancaman bagi keamanan global. Masyarakat internasional harus bekerja sama untuk memerangi kelompok-kelompok ini dan mempromosikan nilai-nilai moderat dan toleran dalam agama.

Meskipun Islam memiliki peran penting dalam diplomasi internasional modern, agama ini juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan terbesar adalah isu radikalisme dan ekstremisme, yang telah menimbulkan ancaman bagi stabilitas regional dan global.

Kelompok-kelompok seperti ISIS dan Al-Qaeda telah menggunakan agama untuk membenarkan kekerasan dan terorisme mereka, dan ini telah merusak citra Islam di mata dunia. Ada kekhawatiran bahwa kelompok-kelompok seperti ini dapat mengambil alih wilayah dan memicu konflik di seluruh dunia.

Tantangan lain yang dihadapi Islam dalam diplomasi internasional adalah ketegangan antara negara-negara Muslim dan Barat. Beberapa negara Barat memiliki kebijakan luar negeri yang kontroversial terhadap negara-negara Muslim, seperti invasi Irak pada tahun 2003. Ini dapat memperburuk ketegangan antara negara-negara Muslim dan Barat dan menyulitkan upaya untuk mencapai perdamaian dan stabilitas regional dan global.

Selain diplomasi bilateral, Islam juga memainkan peran penting dalam diplomasi multilateral. Hal ini terlihat dari banyaknya organisasi

internasional yang didirikan oleh negara-negara Muslim atau yang memiliki mayoritas Muslim. Organisasi-organisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kerja sama di antara negara-negara anggotanya dalam berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Beberapa organisasi internasional yang paling penting yang didirikan oleh negara-negara Muslim atau dengan mayoritas Muslim adalah:

1. . Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)

OKI didirikan pada tahun 1969 dan memiliki 57 anggota. Tujuan utama OKI adalah untuk meningkatkan kerja sama antara negara-negara anggotanya dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. OKI juga bekerja untuk mempromosikan perdamaian dan keamanan di seluruh dunia.

2. Liga Arab

Liga Arab didirikan pada tahun 1945 dan memiliki 22 negara anggota. Liga Arab bertujuan untuk meningkatkan kerja sama di antara negara-negara Arab dalam berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Liga Arab juga berkomitmen untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah.

3. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

PBB didirikan pada tahun 1945 dan memiliki 193 negara anggota. Meskipun bukan organisasi yang didirikan oleh negara-negara Muslim, PBB memainkan peran penting dalam diplomasi multilateral yang melibatkan negara-negara Muslim. Salah satu peran utama PBB dalam diplomasi internasional adalah sebagai mediator dalam konflik antara negara-negara Muslim. PBB juga memiliki berbagai badan dan lembaga yang berfokus pada masalah-masalah yang relevan dengan negara-negara Muslim, seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Program Pangan Dunia (WFP).

Selain organisasi internasional yang didirikan oleh negara-negara Muslim atau dengan mayoritas Muslim, terdapat juga organisasi-organisasi internasional yang melibatkan negara-negara Muslim sebagai anggota atau yang bekerja untuk meningkatkan kerja sama dengan negara-negara Muslim. Beberapa organisasi internasional yang paling penting yang melibatkan negara-negara Muslim atau yang bekerja untuk meningkatkan kerja sama dengan negara-negara Muslim adalah:

4. ASEAN

ASEAN didirikan pada tahun 1967 dan memiliki 10 negara anggota. Meskipun ASEAN tidak didirikan oleh negara-negara Muslim atau dengan mayoritas Muslim, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam adalah negara-negara Muslim yang menjadi anggota ASEAN. ASEAN juga bekerja untuk meningkatkan kerja sama dengan negara-negara Muslim lainnya, seperti melalui kerja sama dengan OKI.

Secara general, tantangan masa depan bagi diplomasi internasional Islam sangatlah besar. Pada masa kini, terdapat berbagai isu global yang mempengaruhi kesejahteraan dan keamanan umat manusia, seperti perubahan iklim, konflik regional dan global, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, dan keamanan siber. Dalam menghadapi tantangan ini, diplomasi internasional Islam dapat memainkan peran penting dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dunia saat ini.

Salah satu cara diplomasi internasional Islam dapat membantu menyelesaikan masalah global adalah melalui kerja sama antar negara Islam dan dengan negara-negara lain di dunia. Misalnya, kerja sama dalam mengatasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan dapat dilakukan melalui inisiatif global seperti Program Aksi Kuala Lumpur untuk Mengatasi

Perubahan Iklim (Kuala Lumpur Action Plan on Climate Change) yang diadopsi oleh Organisasi Kerjasama Islam pada 2008.

Dalam bidang perdamaian dan keamanan, diplomasi internasional Islam dapat membantu mengatasi konflik dan mendorong perdamaian melalui dialog antar agama dan budaya. Pada 2014, Uni Afrika dan Liga Arab bersama-sama mengadopsi inisiatif bersama untuk memerangi terorisme dan ekstremisme, yang menekankan pentingnya dialog dan kerja sama antar agama dan budaya dalam mengatasi konflik.

Di bidang ekonomi, diplomasi internasional Islam dapat memperkuat kerja sama ekonomi antar negara Islam dan dengan negara-negara lain. Contoh dari kerja sama ekonomi internasional Islam adalah Organisasi Kerjasama Islam, yang didirikan pada 1969 dan memiliki 57 anggota negara. Organisasi ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama ekonomi, sosial, dan politik antar negara Islam.

Namun, terdapat juga tantangan yang harus dihadapi oleh diplomasi internasional Islam dalam menghadapi masa depan. Salah satu tantangan utama adalah terkait dengan citra Islam di mata dunia internasional. Akibat dari terorisme dan ekstremisme yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam, citra Islam di mata dunia internasional terus memburuk. Oleh karena itu, diplomasi internasional Islam perlu memperkuat kampanye publik dan komunikasi untuk mengubah citra Islam yang negatif di mata dunia internasional.

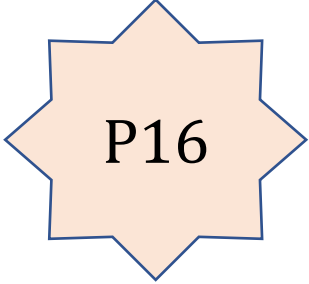
Selain itu, diplomasi internasional Islam juga perlu mengatasi isu-isu internal seperti konflik antar negara Islam dan perbedaan pendapat dalam memandang isu global. Misalnya, konflik di Timur Tengah antara Iran dan Arab Saudi, dan perbedaan pendapat mengenai pemberantasan terorisme dan hak asasi manusia. Dalam menghadapi tantangan ini, diplomasi internasional Islam perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk

memperkuat posisi dan pengaruhnya di kancah internasional. Selanjutnya, silakan baca referensi berikut ini:

1. Akbarzadeh, S., & Abdullah, Z. (2014). Islam and diplomacy: The search for an alternative paradigm. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 34(2), 126-136.
2. Al-Rodhan, N. R. F. (2011). *The five dimensions of global security: Proposal for a multi-sum security principle*. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan.
3. Aslan, S. (2014). Islamic diplomacy: Origins, practices, and the contemporary global context. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 34(2), 137-149.
4. Aydin, M. (2014). The Islamic contribution to international law: The achievements of the Ottoman Empire. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 34(2), 179-190.
5. Bayram, A. (2019). The role of Islam in the foreign policy of Turkey: From Kemalism to Erdoğanism. *Journal of International Affairs and Global Strategy*, 75, 1-14.
6. Donohue, J. J., & Esposito, J. L. (Eds.). (2009). *Islam in transition: Muslim perspectives*. Oxford, UK: Oxford University Press.
7. Fathollah-Nejad, A. (2011). Islam and foreign policy: State-sanctioned religion and its implications for international relations. *Journal of International Affairs*, 65(1), 39-58.
8. Hashemi, N., & Postel, D. (2014). *Sectarianization: Mapping the new politics of the Middle East*. Brookings Doha Center Analysis Paper, (13), 1-16.

9. Khashan, H. (2019). The shifting contours of power in the Middle East: The role of political Islam. *Journal of International Affairs and Global Strategy*, 73, 30-44.
10. Moghadam, V. M. (2011). *The globalisation of martyrdom: Al Qaeda, Salafi Jihad, and the diffusion of suicide attacks*. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.
11. Ramakrishna, K. (2011). *Islamic radicalisation in Southeast Asia: Lessons from the Middle East*. Abingdon, UK: Routledge.
12. Roy, O. (2011). *The failure of political Islam*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
13. Shadi Hamid, S. (2014). The Islamic roots of democratic pluralism. *Journal of Democracy*, 25(4), 17-31.
14. Wistrich, R. S. (2011). *A lethal obsession: Anti-Semitism from antiquity to the global Jihad*. New York, NY: Random House.

UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)



P16

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa akan diberikan sejumlah soal untuk dijawab dan elaborasi lebih lanjut, terkait dengan tema-tema yang telah dijelaskan sebelumnya. Teknik pengumpulan dan penilaian disampaikan kepada mahasiswa, yang juga tergambar dalam penjelasan awal di dokumen ini.

Di akhir perkuliahan ini, mahasiswa juga akan diminta untuk merefleksikan pemahaman mereka terhadap hubungan Islam dalam diplomasi dan politik internasional, dengan mengevaluasi dan memberikan pandangan tentang hal-hal yang berpengaruh terhadap dinamika isu ini ke depan.

REKOMENDASI BACAAN SELANJUTNYA

1. Sukma, Rizal. 2003. *Islam in Indonesian Foreign Policy*. Routledge.
2. Abbas, Tahir (ed). 2007. *Islamic Political Radicalism: A European Perspective*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
3. Arora, Prem. 1999. *International Politics*. New Delhi: Bookhive's.
4. Akbar, M.J. 2003. *The Shade of Swords: Jihad and the Conflict between Islam and Christianity*. New Delhi: Roli Books.
5. Ali, Tariq. 2003. *The Clash of Fundamentalisms: Crusades, Jihads and Modernity*. New Delhi: Rupa.
6. Bamualim, Chaider S., Dick van der Meij and Karlina Helmanita (eds.). 2003. *Islam & the West*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN and KonradAdenauer Stiftung.
7. Bamualaim, Chaider S. (ed.). 2005. *A Portrait of Contemporary Indonesian Islam*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN and Konrad Adenauer Stiftung.
8. Blom, Amelie, Bucaille and Martinez. 2007. *The Enigma of Islamist Violence*. London: Hurst and Company.
9. Chander, Prakash and Prem Arora. 1999. *International Relations*. New Delhi: Bookhive's.
10. Dreyfuss, Robert. 2005. *Devil's Game: How the United States Helped Unleash Fundamentalist Islam*. New York: Owl Books.
11. Donohue, John J. and John L. Esposito. 2007. *Islam in Transition: Muslim Perspectives*. London: Oxford University Press.
12. EU Monitoring and Advocacy Program. 2005. *Muslims in the UK: Policies for Engaged Citizens*. Open Society Institute.
13. Gettleman, Marwin E. and Stuart Schaar (eds). 2005. *The Middle East and Islamic World Reader*. New York: Grove Press.
14. Hashmi, Sohail H. 2003. *Islamic Political Ethics*. Karachi: Oxford University Press.

15. Helmanita, Karlina, Irfan Abubakar and Dina Afrianty (eds.). 2004. *Dialogue in the World Disorder: A Response to the Threat of Unilateralism and World Terrorism*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN and KonradAdenauer Stiftung.
16. Huntington, Samuel. 1996. *The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order*. NY: Simon & Schuster Paperbacks.
17. Jonathan Fox and Samuel Sandler, *Bringing Religion Into International Relations* (Hampshire: Palgrave, 2004)
18. May, Stephen, Tariq Modood and Judith Squires. 2004. *Ethnicity, Nationalism and Minority Rights*. UK: Cambridge University Press
19. McGoldrick, Dominic. 2006. *Human Rights and Religion: The Islamic Headscarf Debate in Europe*. USA: Hart Publishing.
20. Parekh, Bikhu. 2008. *Rethinking Multiculturalis: Keberagaman Budaya dan Teori Politik*. (translated by Impulse, Yogya)
21. Parekh, Bikhu. 2008. *A New Politics of Identity: Political Principles of Interdependence World*. NY: Palgrave MacMillan.
22. Suryadinata, Leo (ed). 2000. *Nationalism and Globalization: East and West*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.